



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 (RENSTRA)



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) mengandung pengertian sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan antisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 mempunyai arti strategis untuk menentukan kembali arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan pada sektor Perizinan dan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun. Renstra ini merupakan perencanaan berdasarkan kondisi 2 tahun terakhir berdasarkan periode Renstra yaitu 5 tahun.

Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dalam mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan , serta indikator kinerja yang telah tercapai.

Rencana Strategis Perubahan digunakan sebagai dokumen Perencanaan SKPD yang memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Purwokerto, 22 September 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas



KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina
NIP. 198003151999122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ...	13
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD	13
2.2 SUMBER DAYA OPD	22
2.3 KINERJA PELAYANAN OPD	63
2.4 KELOMPOK SASARAN	68
2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	68
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
3.1 TUJUAN	71
3.2 SASARAN	72
3.3 STRATEGI	74
3.4 ARAH KEBIJAKAN	75
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB V PENUTUP	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. ASN Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.2. ASN Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	24
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026	65
Tabel 3.1. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029	73
Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Tahunan	74
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP dan RPJMD Kab. Banyumas 2025-2029	76
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	78
Tabel 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas DPMPTSP Kabupaten Banyumas	145
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Banyumas 2025-2029	147
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kabupaten Banyumas 2025-2029	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	5
Gambar 1.2. Gambar Alur Keterhubungan Renstra Dengan Renja dan Penganggaran	6
Gambar 1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga kedepannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Kepala pemerintahan yang baru akan mengemban tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah

terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang telah dilantik tanggal 20 Februari 2025 untuk periode jabatan Tahun 2025–2030 berkewajiban menyusun RPJMD selambat-lambatnya 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah, dan pendekatan bawah-atas, holistik-tematik, integratif dan pendekatan spasial.

Dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

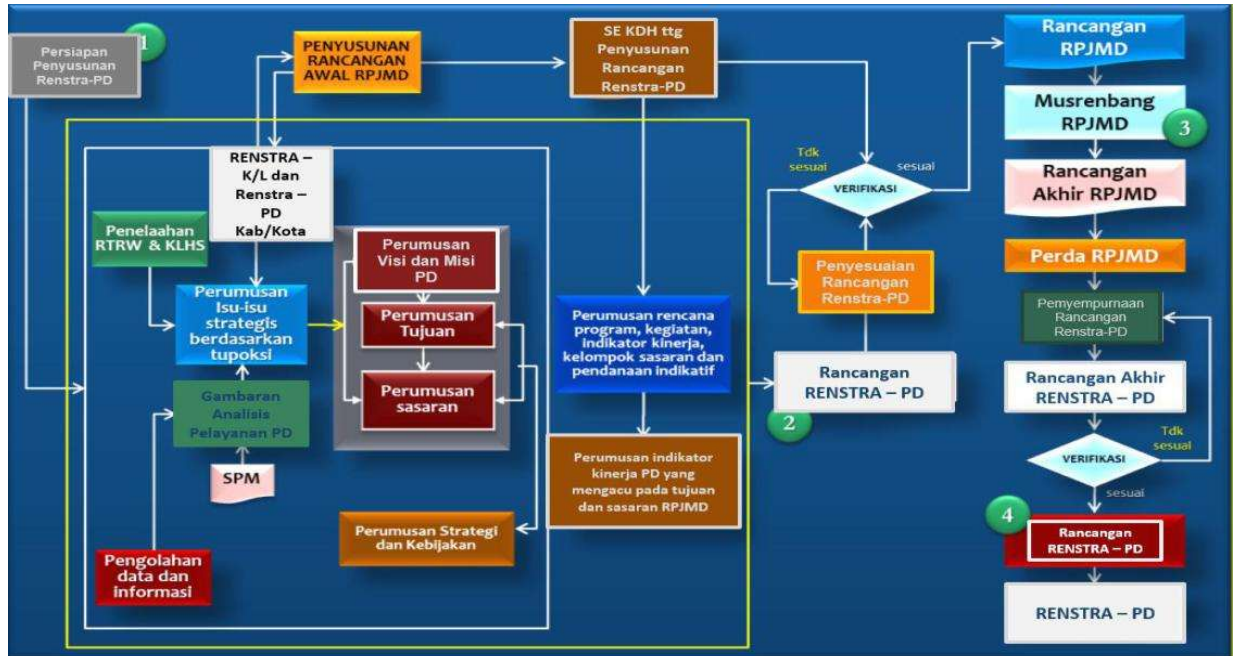
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 5 (lima) tahun yang menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Renstra ANRI dan Perpustakaan Nasional, Telaah Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan tersebut dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

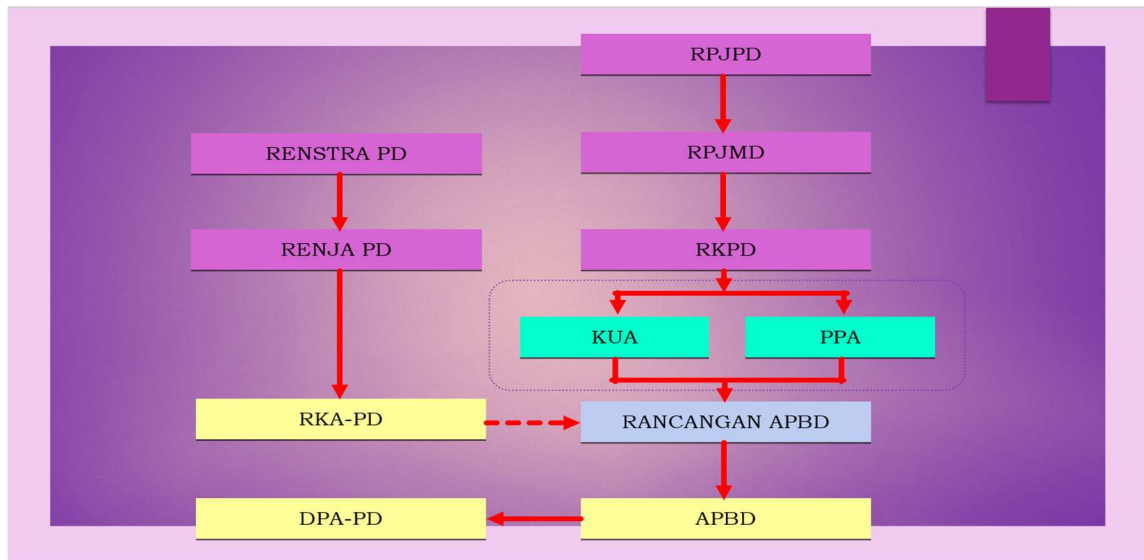


Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana seperti yang tertuang pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Gambar Alur Keterhubungan Renstra Dengan Renja dan Penganggaran



Sumber: DPMTSP Kab. Banyumas 2025

Berdasarkan uraian diatas, sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Renstra DPMTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Renja DPMTSP Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tersebut. Hal ini dimaksud supaya tercipta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah serta antar dokumen perencanaan perangkat daerah dalam menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. PP No. 72 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 94).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab III Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan serta indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kewenangan DPMPTSP Kab. Banyumas adalah pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas mempunyai:

2.1.1. Tugas

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal sektor pembangunan dan lingkungan hidup, bidang pelayanan modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat daerah, memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Amanat peran tersebut tertuang dalam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

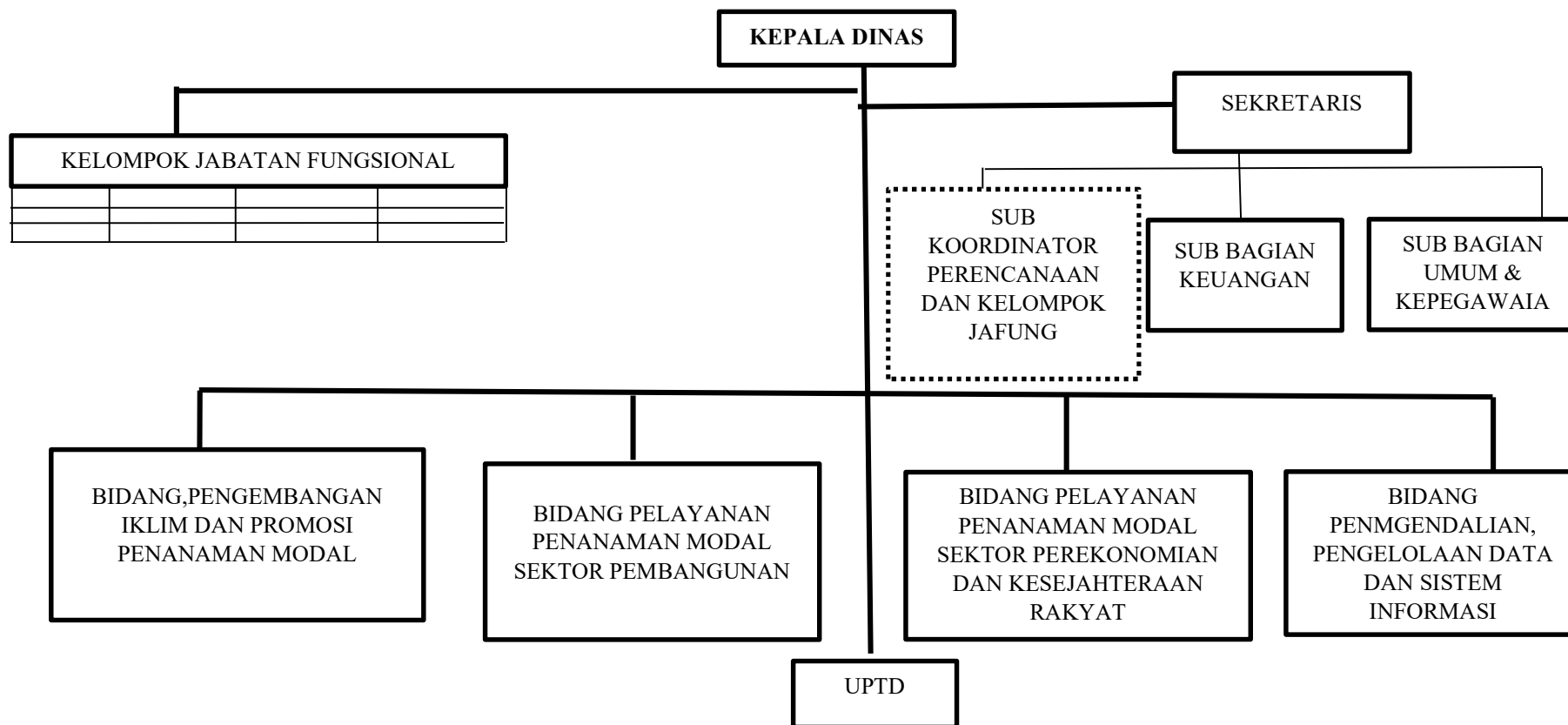
Pintu Kabupaten Banyumas.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan;
- c. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan;
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas



2.1.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

2. Sekretariat

1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan

5. Sub Koordinator Perencanaan

Bertanggung jawab kepada Sekretaris

6. Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- 1. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

7. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan

1. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan adalah unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan penanaman modal sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang pelayanan penanaman modal sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangan daerah.

9. Kepala Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DPMPSTSP ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap jabatan fungsional berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian jabatan dan promosi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
6. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional dan/atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional :

1. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
2. Kepala Perangkat Daerah dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya.
3. Penugasan Pejabat Fungsional berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
4. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit kerja pemilik kinerja.

Ketentuan lainnya :

1. Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit kerja.
2. Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
3. Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
4. Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2025 sebanyak 75 orang, terdiri dari 36 ASN dan 39 non ASN. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 39 orang jumlah pegawai S2 sejumlah 8 orang.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas per 20 September 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
ASN Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	2	0	2	5,56
Golongan II	1	2	3	8,22
Golongan III	10	9	19	52,78
Golongan IV	6	3	9	25
B. PPPK	2	1	3	8,33
Jumlah	37	19	36	

Sumber: DPMPTSP, 20 September 2025.

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2
ASN Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	3	0	3	4
SMP	2	0	2	2,67
SMA	8	4	12	16
D-I	-	-	-	-
D-II	-	-	-	-
D-III	7	4	11	14,67
S-1	20	19	39	52
S-2	6	2	8	10,67
S-3	-	-	-	-
Jumlah	46	29	75	

Sumber: DPMPTSP, 20 September 2025.

Keterangan :

Untuk tenaga penunjang yaitu tenaga Non ASN pada DPMPTSP Kab. Banyumas sejumlah 39 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, alat bengkel/ukur, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan air/irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

A. Aset Barang

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
1	132.010.101.001	1	Alat Pendingin (AC)	2021	PANASONIC	1 PK	Plastik, Besi			APBD Kab.	5.350.000	
2	132.010.304.005	1	Generating set (Genset) MPP	2019	Krisbow	60 KVA	Besi			APBD Kab.	246.500.000	
3	132.020.101.003	1	Station Wagon	2015	Suzuki	1493 cc	Besi		R 1056 XA	APBD Kab.	174.854.400	Eks R 9502 AG
4	132.020.101.003	1	Station Wagon	2016	Toyota		Besi		R 1170 XA	APBD Kab.	190.280.000	ex. R 9500 DG
5	132.020.101.003	1	Station Wagon	2017	Toyota	2000 cc	Besi		R 1315 XA	APBD Kab.	290.625.532	Eks R 40 A, Irawati - Kepala DPMTSP
6	132.020.101.003	2	Station Wagon	2017	Toyota	1329 cc	Besi		R 1297 XA	APBD Kab.	193.435.532	
7	132.020.101.003	1	Station Wagon	2023	Toyota	1496	Besi Campuran		R 1422 XA	APBD Kab.	269.000.000	Sekretaris DPMTSP
8	132.020.101.004	1	Mobil MPV	2022	Toyota		Campuran		R 1768 XA	APBD Kab.	225.000.000	Bagas - Kabid

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
9	132.020.102.003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2023	Toyota	2982	Besi Campuran		R 7026 XA	APBD Kab.	576.000.000	Operasional
10	132.020.104.001	1	Sepeda Motor	2010	HONDA	110 cc	CAMPURAN		R 6129 XA	APBD Kab.	13.014.500	Eks R 9702 FH, Arici - Non ASN
11	132.020.104.001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	110 cc	Campuran		R 6860 XH	APBD Kab.	11.685.655	Eks R 9953 FH, Achmad Ngusfuri - Pengurus Barang
12	132.020.104.001	2	Sepeda Motor	2012	Honda	110 cc	Campuran		R 6863 XH	APBD Kab.	11.685.655	Eks R 9954 FH, Norman - Non Asn
13	132.020.104.001	3	Sepeda Motor	2012	Honda	110 cc	Campuran		R 6862 XH	APBD Kab.	11.685.655	Eks R 9955 FH, Anjas - Non ASN
14	132.020.104.001	4	Sepeda Motor	2012	Honda	110 cc	Campuran		R 6861 XH	APBD Kab.	11.685.655	Eks R 9956 FH, Purdadi
15	132.020.104.001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	113 cc	Besi		R 6145 XA	APBD Kab.	14.762.500	Eks R 9623 JH, Iwan - Kasubbag Perencanaan
16	132.020.104.001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	Besi		R 6670 XA	APBD Kab.	15.672.115	BPM PP Eks R 9857 JH, Kuswardan - Kasubbag Keuangan

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
17	132.020.104.001	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	Besi		R 6659 XA	APBD Kab.	15.672.115	BPM PP Eks R 9861 JH, Darmanto - Kasubbag Umpeg
18	132.020.104.001	1	Sepeda Motor	2023	Yamaha		Besi Plastik		R 6779 XR	APBD Kab.	31.800.000	Operasional ke Imigrasi Cilacap
19	132.020.201.010	1	Meja Meeting	2021	Tanpa merk	1200 x 1960	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	12.100.000	
20	132.020.201.010	2	Meja Front Desk PTSP	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	6.600.000	
21	132.020.202.001	1	Sepeda	2009	PHOENIX		Besi			APBD Kab.	660.000	
22	132.030.305.021	1	Pengadaan Video Conference System	2021	Tanpa merk					APBD Kab.	18.590.000	
23	132.030.305.097	1	Printer All In One	2021	CANON PIXMA	A4	Plastik, Besi	912315 C01 992AC2 1KN JV0150 6		Hibah	2.600.400	BENTUK APRESIASI KEPADA 40 NOMINE ATAS PENILAIAN KINERJA PTSP FDAN KINERJA PERCEPATAN

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
												PELAKSANAAN BE
24	132.030.305.097	2-11	Printer	2021	EPSON	F4	Besi, Plastik			APBD Kab.	48.500.000	
25	132.030.305.097	12-15	Printer	2021	EPSON	A4	Besi, Plastik			APBD Kab.	15.520.000	
26	132.030.305.097	16-25	Printer	2021	EPSON	A4	Besi, Plastik			APBD Kab.	17.650.000	CV. TRIPIO COMPUTER
27	132.030.311.004	1	Backdrop Meeting Room	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	22.000.000	
28	132.030.311.004	2	Meeting Room III	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	30.690.000	
29	132.030.311.004	3	Credenza	2021	Tanpa merk	750 x 760	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	3.300.000	
30	132.030.311.004	4	Blackdrop R. Karantina MPP	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	9.900.000	
31	132.030.311.004	5	Sekat Ruang Pelayanan OSS	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	4.400.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
32	132.030.311.004	6	Pintu Koboi Ruang Pelayanan OSS	2021	Tanpa merk	1085 x 1885	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	2.145.000	
33	132.040.104.005	1	Lemari Penyimpan	2019	TM		HPL, kaca			Hibah	3.500.000	MPP
34	132.050.101.001	1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2013	Brother	13"	campuran			APBD Kab.	1.980.000	
35	132.050.104.001	1	Lemari Kabinet	2003	Brother, Ellite		Besi			APBD Kab.	666.700	
36	132.050.104.001	1-2	Lemari Besi/Metal	2019	BROTHER		metal			Hibah	5.400.000	MPP
37	132.050.104.002	1	Lemari File Pegawai	2004			Kayu			APBD Kab.	1.500.000	
38	132.050.104.002	2	Lemari Buku Kaca	2004			Kayu			APBD Kab.	2.150.000	
39	132.050.104.002	1	Lemari Buku Kaca	2005			Kayu			APBD Kab.	1.500.000	
40	132.050.104.002	1	Lemari File Pegawai	2006			Kayu			APBD Kab.	1.500.000	
41	132.050.104.002	2	Lemari Buku Kaca	2006			Kayu			APBD Kab.	2.900.000	
42	132.050.104.002	1-2	Lemari Buku Kayu Jati	2008			Kayu			APBD Kab.	4.300.000	
43	132.050.104.002	1-3	Lemari Kayu	2009			Kayu			APBD Kab.	10.650.000	
44	132.050.104.002	1	Laci Meja Kasir	2010			Kayu			APBD Kab.	875.000	
45	132.050.104.002	2	Almari (tempat kunci)	2010			Aluminium/Kaca			APBD Kab.	250.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
46	132.050.104.002	3	Almari Arsip Kayu Jati	2010			Kayu			APBD Kab.	3.750.000	
47	132.050.104.002	1	Almari Alat Dapur	2011			Kayu, kaca			APBD Kab.	6.600.000	
48	132.050.104.002	2-4	Almari Kayu Jati	2011			Kayu, Kaca			APBD Kab.	10.500.000	
49	132.050.104.002	1	Lemari Berkas	2017		T=3 m	Kayu			APBD Kab.	31.450.000	
50	132.050.104.002	2	Lemari Server	2017			Kayu			APBD Kab.	1.200.000	
51	132.050.104.002	3-4	Lemari 2 Pintu	2017			Kayu			APBD Kab.	1.000.000	
52	132.050.104.003	1-3	Rak Besi/Metal	2003		4 laci	Besi			APBD Kab.	750.000	
53	132.050.104.003	1-4	Rak Besi	2004			Besi			APBD Kab.	3.700.000	
54	132.050.104.003	1-3	Rak Besi	2006	BROTHER		Besi			APBD Kab.	3.000.000	
55	132.050.104.003	2	Rak Besi	2006			Besi			APBD Kab.	1.500.000	
56	132.050.104.003	1-4	Rak Besi 5 Susun	2008		5 Susun	Besi			APBD Kab.	7.400.000	
57	132.050.104.003	5	Rak Televsi	2008	Safety Gloss		Kayu			APBD Kab.	700.000	
58	132.050.104.003	1-4	Rak Besi	2010		5 Susun				APBD Kab.	4.800.000	
59	132.050.104.003	1-4	Rak Besi	2011			Besi			APBD Kab.	7.400.000	
60	132.050.104.003	1-4	Rak Besi/Metal	2012		1000 x 380 x 2050mm	Besi			APBD Kab.	6.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
61	132.050.104.003	5-6	Rak Besi/Metal	2012		1000 x 380 x 2050 mm	Besi			APBD Kab.	3.000.000	
62	132.050.104.003	1-3	Rak Besi	2014	DATAFILE	1975 x 450 x 1050 mm	Plat Metal			APBD Kab.	6.300.000	
63	132.050.104.003	1-3	Rak Besi/Metal	2015		200 x 100 x 40 Cm	Besi			APBD Kab.	6.930.000	v
64	132.050.104.003	1-6	Rak Besi/Metal	2016	BROTHER	W 100 x D 38 x H 200	Metal			APBD Kab.	13.620.000	
65	132.050.104.003	1-2	Rak Arsip	2018	DATAFILE	5 susun	Besi			APBD Kab.	6.000.000	
66	132.050.104.003	1-5	Rak Arsip	2020	DATAFILE	W 900 x D 400 x H 2200 mm	Besi			APBD Kab.	16.990.000	
67	132.050.104.003	1-4	Rak Arsip Besi	2024	Brother	P:100, L:38, T:200 cm	Besi, Plastik			APBD Kab.	9.600.000	Warna Abu-Abu
68	132.050.104.004	1	Almari (Rak) File Pegawai	2003			Kayu			APBD Kab.	750.000	
69	132.050.104.004	2-3	Rak Kayu	2003		2 x 0,4	Kayu			APBD Kab.	1.000.000	
70	132.050.104.004	4-5	Rak Kayu	2003		1,5 x 0,7 Cm	Kayu			APBD Kab.	800.000	
71	132.050.104.004	6	Rak Kayu	2003		1,5 x 1,5 Cm	Kayu			APBD Kab.	300.000	
72	132.050.104.004	1	Rak Kembang	2009			Kayu			APBD Kab.	950.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
73	132.050.104.004	1	Rak Tas Mal Pelayanan Publik	2022	Tanpa merk	4 Meter	Kayu, Besi	0		APBD Kab.	2.600.000	CV. WIDJAJAN TO KONSTRUKSI SARANA
74	132.050.104.007	1	Brand Kas	2003	Cobra		Besi			APBD Kab.	2.500.000	
75	132.050.104.026	4-7	Filling Besi/Metal	2003	Elite	4 laci	Besi			APBD Kab.	900.000	
76	132.050.104.026	9	Filling Kabinet	2003	Elite		Besi			APBD Kab.	1.750.000	
77	132.050.104.026	1	Filling Kabinet	2004	Elite	3 Laci	Besi			APBD Kab.	1.275.000	
78	132.050.104.026	1	Filling Kabinet	2005	Brother	4 Laci	Besi			APBD Kab.	1.050.000	
79	132.050.104.026	1-5	Filling Kabinet	2006	Elite	4 Laci	Besi			APBD Kab.	5.000.000	
80	132.050.104.026	1	Filling Besi/Metal	2007	Brother		Besi			APBD Kab.	1.500.000	
81	132.050.104.026	1-2	Filling Kabinet 4 Laci	2008	Brother		Besi			APBN	7.400.000	
82	132.050.104.026	1-3	Filling Kabinet	2010	Brother	4 Laci	Besi			APBD Kab.	3.400.000	
83	132.050.104.026	1-4	Filling Kabinet	2011	VIP	4 Laci	Besi			APBD Kab.	6.400.000	
84	132.050.104.026	1	Filling Besi/Metal	2012		450mm x 600mm x 750mm	Besi			APBD Kab.	2.000.000	
85	132.050.104.026	1	Filling Kabinet	2014	DATAFILE	425 x 620 x 1031 mm	Besi			APBD Kab.	2.500.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
86	132.050.104.026	2	Filling Besi/Metal	2017	Brother	Isi 4	Besi			APBD Kab.	2.700.000	
87	132.050.104.027	1-2	Lemari Buku Kaca	2008			Kayu			APBD Kab.	4.000.000	
88	132.050.104.029	1	Kotak Saran	2003			Kayu			APBD Kab.	350.000	
89	132.050.104.029	1-3	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	183x90x45 Cm	Campuran			APBD Kab.	7.590.000	
90	132.050.104.029	4-7	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	95x90x45 Cm	Campuran			APBD Kab.	6.380.000	
91	132.050.104.029	8	Almari Arsip Pintu Kaca Geser	2013	Brother	183x90x45 Cm				APBD Kab.	2.530.000	
92	132.050.104.029	1-2	Lemari Arsip Pintu Kaca Geser	2017	IMPORT A	E - 18	Besi, Kaca			APBD Kab.	5.000.000	
93	132.050.105.002	1	CCTV - Camera Control Television System	2023	Hikvision		Plastik			APBD Kab.	20.896.638	NVR (Kantor MPP)
94	132.050.105.002	2	CCTV - Camera Control Television System	2023	Hikvision		Plastik			APBD Kab.	20.896.638	NVR (Kantor DPMPTSP)
95	132.050.105.002	3-5	CCTV - Camera Control Television System	2023	HIKVISION		PLASTIK, KACA			APBD Kab.	7.425.000	CCTV BUNDAR PUTIH HIKVISION

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
			Indoor MPP dan Mabes									MPP DAN MABES
96	132.050.105.002	6-7	CCTV - Camera Control Television System OUTDOOR	2023	HIKVISION		PLASTIK, KACA			APBD Kab.	4.950.000	CCTV BUNDAR PUTIH HIKVISION MPP DAN MABES
97	132.050.105.005	1	White Board Komplit	2003		90 x 120 Cm				APBD Kab.	800.000	
98	132.050.105.005	2	White Board	2003		60 x 90 Cm	Formika			APBD Kab.	375.000	
99	132.050.105.005	4	White Board	2003		1,1 x 1	Formika			APBD Kab.	150.000	
100	132.050.105.005	5-6	White Board	2003			Formika			APBD Kab.	380.000	
101	132.050.105.005	1	White Board	2012	Brother	120 x 240 cm	Campuran			APBD Kab.	2.500.000	
102	132.050.105.005	1	Papan Struktur Organisasi	2017		120 cm X 240 cm	Melamin putih			APBD Kab.	1.019.000	
103	132.050.105.005	2-3	Papan Struktur Organisasi	2017		120 cm X 120 cm	Melamin Putih			APBD Kab.	1.134.000	
104	132.050.105.005	4	Papan data jenis layanan perizinan	2017		120 cm X 200 cm	Melamin Putih			APBD Kab.	864.000	
105	132.050.105.005	5	Papan data jenis layanan perizinan	2017		130 cm X 200 cm	Melamin Putih			APBD Kab.	936.000	
106	132.050.105.009	1	Peta Kabupaten Banyumas	2006			Kertas			APBD Kab.	200.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
107	132.050.105.010	1	Alat Penghancur Kertas	2019	GEMET		Mika, besi			Hibah	2.150.000	MPP
108	132.050.105.012	1	Mesin Absensi Wajah	2014		10.47mm x16 mmx3.6 mm	Campuran			APBD Kab.	4.200.000	
109	132.050.105.012	1-2	Mesin Absensi Wajah	2018	Solution	6.000 sidik jari	Besi, Kaca			APBD Kab.	8.400.000	
110	132.050.105.012	1	Mesin Absensi	2019	PRIMAT ECH	VF-300	Besi, Kaca	PO 325		APBD Kab.	4.700.000	
111	132.050.105.012	1	Mesin Absensi	2024	Solution		Plastik			APBD Kab.	5.750.000	
112	132.050.105.043	1-2	Projector	2023	VIEW SONIC		Plastik			APBD Kab.	24.900.000	
113	132.050.105.052	1	Pintu Entrance Meeting Room	2021	Tanpa merk		Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	4.950.000	
114	132.050.105.052	2	Pintu Koboi	2021	Tanpa merk	1400 x 1191	Blockboard dan sejenisnya			APBD Kab.	3.300.000	
115	132.050.105.052	1	Paket Door Accer Control	2022	fingerspot	Kartu	Besi, Plastik			APBD Kab.	7.148.500	Toko INDO Jaya
116	132.050.105.075	1	Mesin Antrian	2019	TM		-			Hibah	32.400.000	MPP
117	132.050.105.077	1	Papan Pengumuman	2018		200x175 cm	Kayu			APBD Kab.	1.200.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
118	132.050.105.077	2	Papan Pengumuman	2018		120x80 cm	Kayu			APBD Kab.	800.000	
119	132.050.105.077	3	Papan Maklumat	2018						APBD Kab.	2.061.000	
120	132.050.105.088	1	Neon Box 2 Muka + Tiang	2006			Besi			APBD Kab.	8.000.000	
121	132.050.105.088	1-3	Baliho	2009			Besi			APBD Kab.	44.210.500	
122	132.050.105.088	1	Barcode	2015			Campuran			APBD Kab.	2.948.000	
123	132.050.105.088	3	GPS	2015			Campuran			APBD Kab.	7.507.500	
124	132.050.105.088	1-2	Sidik Jari Absensi	2019	Solution	U.Are.U 4500 of	Besi, Plastik	SSL099 003 3		APBD Kab.	2.560.000	
125	132.050.201.001	1	Meja Kerja	2021	Tnpa merk	1100mm x 750mm x 710mm	Kayu			APBD Kab.	2.915.000	
126	132.050.201.001	2	Meja Kerja, Meja Pelayanan dan Backdrop	2021	Tanpa merk		Blockboard, Lapis HPL			APBD Kab.	37.200.000	
127	132.050.201.002	1-8	Kursi kerja/kayu	2000						APBD Kab.	464.840	
128	132.050.201.002	1-3	Kursi Dengan Sandaran Tangan	2003			Kayu			APBD Kab.	900.000	
129	132.050.201.002	1	Kursi Dengan	2004			Kayu			APBD Kab.	300.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
			Sandaran Tangan									
130	132.050.201.002	1	Meja Locket	2006			Kayu			APBD Kab.	7.000.000	
131	132.050.201.002	4-13	Kursi Biasa Kayu	2008			Kayu			APBD Kab.	5.000.000	
132	132.050.201.005	1-2	Zice	2003			Kayu			APBD Kab.	300.000	
133	132.050.201.008	1-3	Meja Rapat	2003			Kayu			APBD Kab.	2.250.000	
134	132.050.201.008	4-8	Meja Rapat	2003		2 x 1 M	Kayu			APBD Kab.	2.500.000	
135	132.050.201.008	1-3	Meja Rapat Bahan Kayu Jati	2005			Kayu			APBD Kab.	3.750.000	
136	132.050.201.008	1	Meja Rapat Pimpinan	2017			Kayu			APBD Kab.	4.800.000	
137	132.050.201.008	1	Meja Rapat	2018	Multiple k finished HPL	L 2,4 W 1,2 H 0,75	Multiple k finished HPL			APBD Kab.	5.000.000	
138	132.050.201.012	1	Meja Telpon	2006			Kayu			APBD Kab.	575.000	
139	132.050.201.013	1	Meja Podium	2015			Kayu			APBD Kab.	3.410.000	
140	132.050.201.014	1	Meja Resepsionis	2018	Multiple k finished HPL	L 2 W 0,6 H 1,1	Multiiple k finished HPL			APBD Kab.	5.500.000	
141	132.050.201.017	1-2	Kursi Roda	2018	Standart		Besi			APBD Kab.	2.400.000	
142	132.050.201.022	1	Baby Tafel	2019			Acrilyc			APBD Kab.	3.410.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
143	132.050.201.024	1-2	Meja 1/2 Biro	1998	tanpa merk	1/2 biro	Kayu			APBD Kab.	1.000.000	DPMPTSP
144	132.050.201.024	3-4	Meja 1/2 Biro	1998	tanpa merk	1/2 biro	Kayu			APBD Kab.	1.000.000	DPMPTSP
145	132.050.201.024	8-15	Meja	2003			Kayu			APBD Kab.	3.666.800	
146	132.050.201.024	1-2	Meja	2004		1/2 Biro	Kayu			APBD Kab.	1.200.000	
147	132.050.201.024	1-4	Meja Kerja	2005		1/2 Biro	Kayu			APBD Kab.	2.400.000	
148	132.050.201.024	1-3	Meja Kerja Biro Sedang	2008		Sedang	Kayu			APBD Kab.	8.100.000	
149	132.050.201.024	4-14	Meja Kerja Setengah Biro	2008		1/2 Biro				APBD Kab.	10.450.000	
150	132.050.201.025	1-2	Kasur/Spring Bed	2021	Royal	160 x 200	Busa, Kain			APBD Kab.	7.917.000	Toko. FURNI Center
151	132.050.201.030	1-15	Kursi Rapat	2003			Kayu			APBD Kab.	3.000.000	
152	132.050.201.030	2-5	Kursi Rapat	2005	futura		Besi			APBD Kab.	1.000.000	
153	132.050.201.030	1-3	Kursi Rapat	2007	Chitose		Besi			APBD Kab.	1.080.000	
154	132.050.201.030	1-5	Kursi Kerja/Rapat	2009	FUTURA		Besi			APBD Kab.	1.550.000	
155	132.050.201.030	1-20	Kursi Rapat	2010	futura		Besi			APBD Kab.	6.175.000	
156	132.050.201.030	1-25	Kursi Rapat	2018			Besi, Plastik			APBD Kab.	21.125.000	
157	132.050.201.030	1-40	Kursi Rapat	2019	Rapat		Besi, Plastik			APBD Kab.	37.200.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
158	132.050.201.030	1-13	Kursi Susun Futura 405	2020	Futura	43 x 46 x 86 cm	Besi			APBD Kab.	6.500.000	
159	132.050.201.031	1-3	Kursi Tamu	2015			Campuran			APBD Kab.	9.075.000	v
160	132.050.201.031	1	Meja dan Kursi Tamu	2017			Kayu dan kain			APBD Kab.	5.500.000	
161	132.050.201.031	2	Kursi Tamu Sudut	2017			Busa & dilapisi kain/osc ar			APBD Kab.	2.690.000	
162	132.050.201.031	1	Kursi Tamu Sudut	2018		Besar	Kayu, Busa			APBD Kab.	2.740.000	
163	132.050.201.031	1-4	Kursi cafe	2023	tanpa merk		besi, polyuret hane			APBD Kab.	5.700.000	
164	132.050.201.031	5-30	Kursi hadap pemohon	2023	tanpa merk		besi, plastik, busa			APBD Kab.	37.050.000	kursi hadap pemohon merah
165	132.050.201.031	31-61	Kursi Tunggu Pemohon	2023	Tanpa Merk		Kain, Plastik, Besi			APBD Kab.	69.750.000	Kursi Merah pengganti kursi warna warni
166	132.050.201.032	1-4	Kursi Putar	2015			Campuran			APBD Kab.	11.550.000	
167	132.050.201.032	1-11	Kursi Putar	2017	Brother		Campuran			APBD Kab.	14.300.000	
168	132.050.201.032	1	Kursi Pejabat / Direktur	2018			Besi, Busa			APBD Kab.	1.900.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
169	132.050.201.032	2-4	Kursi Menejer	2018			Besi, Busa			APBD Kab.	5.400.000	
170	132.050.201.032	1-10	Kursi Putar Ergotec 903 T	2020	Ergotec	Putar	Oscar			APBD Kab.	14.000.000	
171	132.050.201.032	11-16	Kursi Putar	2020	Ergotec	Putar	Besi, kain			APBD Kab.	7.200.000	
172	132.050.201.032	1-50	Kursi staf pegawai	2023	tanpa merk					APBD Kab.	72.500.000	kursi staf hitam
173	132.050.201.032	51-52	Kursi Putar Direktur LX 933	2023	Ergotec LX 933		Kulit, Busa, Besi			APBD Kab.	6.900.000	Kursi Direktur Hitam
174	132.050.201.032	1-14	Kursi Kerja Staff Putar	2024	Indachi D-3007		Plastik, Besi			APBD Kab.	20.790.000	
175	132.050.201.033	13-15	Kursi Kerja Biasa	2003			Kayu			APBD Kab.	737.400	
176	132.050.201.033	1-3	Kursi Biasa/Kerja	2004			Kayu			APBD Kab.	525.000	
177	132.050.201.033	1-4	Kursi Biasa Kayu Jati	2005			Kayu			APBD Kab.	72.000	
178	132.050.201.035	1-2	Bangku Tunggu	2003		2 x 0,050 x 0,050	Kayu			APBD Kab.	700.000	
179	132.050.201.035	1-80	Bangku Tunggu	2019	TM		spon, kulit			Hibah	61.200.000	MPP
180	132.050.201.036	1-28	Kursi Lipat	2006	Phoenix		Besi			APBD Kab.	4.200.000	
181	132.050.201.036	1-40	Kursi Lipat	2019	Chitose	1	Besi, spon			Hibah	30.800.000	MPP
182	132.050.201.039	1	Meja Komputer	2003	Paradise		Kayu			APBD Kab.	50.000	
183	132.050.201.039	1-6	Meja Komputer	2005	Pro Design		Kayu			APBD Kab.	1.650.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
184	132.050.201.039	1-3	Meja Komputer	2008	Pro Design		Kayu			APBD Kab.	1.500.000	
185	132.050.201.039	1	Meja Komputer	2009	Pro Design		Kayu			APBD Kab.	1.500.000	
186	132.050.201.039	1	Meja Telepon	2011	Melody/ Furniture		Kayu			APBD Kab.	600.000	
187	132.050.201.039	2	Meja LCD	2011	Callisto		Kayu, besi			APBD Kab.	550.000	
188	132.050.201.048	1-75	Sofa	2018		L 0,8 W 0,4 H 0,4	Kayu, Buaa Finished Kain.			APBD Kab.	60.000.000	
189	132.050.201.048	1	Sofa	2019	Custom	3 Bantal	Kayu, Busa Dan Kalep			APBD Kab.	4.950.000	
190	132.050.201.048	2-3	Sofa MPP	2019	TROPPIIS		Kayu, Busa, Finished, Kain			APBD Kab.	8.998.000	
191	132.050.201.048	4	Sofa Tamu	2019	TM		Kayu, busa lapis oscar			Hibah	10.950.000	MPP
192	132.050.201.048	1	Sofa	2020			Kayu, kain			APBD Kab.	2.200.000	
193	132.050.201.048	1	Sofa	2021	Tanpa merk	2 m x 0,8 m x 0,58 m	Kayu, Kain			APBD Kab.	9.518.125	
194	132.050.201.048	2	Sofa	2021	Tanpa merk	1,35 mx0,8	Kayu, Kain			APBD Kab.	7.068.125	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
						mx0,58 m						
195	132.050.201.048	3	Sofa	2021	Tanpa merk	1 m x 0,8 m x 0,58 m				APBD Kab.	4.193.125	
196	132.050.201.048	1-2	Sofa	2023	Tanpa Merk		Busa, Kulit, Kayu			APBD Kab.	12.900.000	Kursi Sofa 2 1 1 Hitam Kabid Sekko Kesra Dan Pembangunan
197	132.050.201.050	1	Korden Vertikal Tipe Blind	2009		115 M2	Kain			APBD Kab.	19.550.000	
198	132.050.201.050	2	Etalase/Sketsel	2009		76,0 M2	Aluminium			APBD Kab.	34.082.090	
199	132.050.201.050	5-8	Hardisk External	2011	GoFlex	500 GB	Campuran			APBD Kab.	3.400.000	
200	132.050.201.050	1	Lemari Loker / Besi	2012	BROTHER	5 laci	Besi			APBD Kab.	2.200.000	
201	132.050.201.050	2	Korden Vertical Blinds	2012	Onna Biru	5,5 M2	Kain			APBD Kab.	633.600	
202	132.050.201.050	1-3	Kursi Tunggu	2013	IMPORT A	212x530 x680 mm	Stainless			APBD Kab.	5.460.000	
203	132.050.201.050	1-2	Almari Besi 2 pintu	2014	DATAFILE	900 x 450 x 1850 mm	Besi			APBD Kab.	4.300.000	
204	132.050.201.050	3-4	Almari Besi pintu sorong kecil	2014	DATAFILE	900x450 x920 mm	Besi			APBD Kab.	4.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
205	132.050.201.050	5	Tempat Koran Bahan Kayu	2014			Kayu			APBD Kab.	500.000	
206	132.050.201.050	1	Karpet	2016	Troppis		Kain			APBD Kab.	3.850.000	
207	132.050.201.050	1	CCTV TV Set	2017	HIKVISION	DS-7200 Series	Campuran			APBD Kab.	8.110.000	
208	132.050.201.050	1-3	My Screen Motorize Metal Case Model Focus VS 150	2018			Besi, Plastik			APBD Kab.	18.481.200	
209	132.050.201.050	4-53	Kursi Hadap Pemohon	2018			Besi, Plastik			APBD Kab.	25.000.000	
210	132.050.201.050	54	Kursi Petugas	2018			Besi, Plastik			APBD Kab.	845.000	
211	132.050.201.050	110	Sistem Antrian Otomatis (Tonuchscreen)	2018		15"	Besi, Kaca, Plastik			APBD Kab.	35.750.000	
212	132.050.201.050	111	Meja Biding	2018		L 1,6 W 0,6 H 0,75	Multiple k finished HPL			APBD Kab.	2.000.000	
213	132.050.201.050	112	Meja Kerja Kepala	2018	Multiple k finished HPL	L 1,6 W 0,7 H 0,65	Multiple k finished HPL			APBD Kab.	4.500.000	
214	132.050.201.050	1	Korden Vertikal Blind	2019		59,77 Meter	Kain			APBD Kab.	18.326.976	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
215	132.050.201.050	2	Meja Kulkas	2019			Kayu			APBD Kab.	1.870.000	
216	132.050.201.050	3	Multi Informasi Display (MID)	2019	TREMENDO	55"	Besi, Plastik			APBD Kab.	63.580.000	
217	132.050.201.050	4	TV Touchscreen	2019	Samsung	55 Inch	Besi, Plastik			APBD Kab.	97.020.000	
218	132.050.201.050	5	Sofa Difabel	2019	TROPPIIS	4 Tempat Duduk	Kayu, Busa Finished Kain			APBD Kab.	13.200.000	
219	132.050.201.050	6	Loker	2019	TROPPIIS		Multiple k & decosheet			APBD Kab.	39.216.100	
220	132.050.201.050	7	Lemari Dapur	2019	TROPPIIS		Multiple k & decosheet			APBD Kab.	23.292.500	
221	132.050.201.050	1	Almari Loker	2020			Kayu			APBD Kab.	2.600.000	
222	132.050.201.050	2	Lemari Arsip	2020	Serbaguna		Kayu			APBD Kab.	1.155.000	
223	132.050.201.050	3-10	Kursi Kantor Hadap Frontline	2020	Frontline	ss gbr	Besi			APBD Kab.	6.400.000	
224	132.050.201.050	1	Meja Pelayanan & Backdrop, Pembuatan Meja Kerja	2021	Tanpa Merk	10,72	Bocboard & sejenisnya			APBD Kab.	12.794.246	0

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
225	132.050.201.050	2	(Home Use) Mic Clip On Wireles	2021			Besi			APBD Kab.	5.400.000	0
226	132.050.202.001	1-2	Jam Dinding	2005	SEIKO OKA 327 BE		Plastik			APBD Kab.	200.000	
227	132.050.202.001	1	Jam Dinding	2008	Seiko		Plastik			APBD Kab.	285.000	
228	132.050.202.001	1	Jam Dinding	2019			Plastik, Kaca			APBD Kab.	700.000	
229	132.050.203.001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2015	Modena		Campuran			APBD Kab.	1.306.800	v
230	132.050.203.003	1	Mesin Potong Rumput	2012		9,4 Kg				APBD Kab.	2.500.000	
231	132.050.204.001	1	Lemari Es	2015	Panasonic					APBD Kab.	1.826.000	
232	132.050.204.001	1	Lemari Es	2019	MIDEA	65 L	Besi, Plastik	S52770 [11190585]		APBD Kab.	1.350.000	
233	132.050.204.001	1	Lemari Es	2020	FRIGIGATE	1 Pintu	Besi, platik			APBD Kab.	1.500.000	
234	132.050.204.003	1-2	AC 1 PK	2003	Toshiba	1 PK	Campuran			APBD Kab.	10.500.000	
235	132.050.204.003	3	AC 2 PK	2003	Toshiba	2 PK	Campuran			APBD Kab.	8.750.000	
236	132.050.204.003	1-2	AC 1 PK	2006	Panasonic	1 PK	Besi			APBD Kab.	8.500.000	
237	132.050.204.003	3	AC Unit	2007	Panasonic	1 PK	Besi			APBD Kab.	3.500.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
238	132.050.204.003	1-2	AC Kapasitas 1 PK	2008	Panasonic	1 PK	Besi			APBD Kab.	7.000.000	
239	132.050.204.003	1-2	AC	2011	Panasonic	2 PK	Besi			APBD Kab.	14.500.000	
240	132.050.204.003	1-2	AC Unit	2016	Sharp	0,5 PK	Campuran			APBD Kab.	7.000.000	
241	132.050.204.003	1	AC Unit	2017	Sharp	1 PK	Campuran	-		APBD Kab.	4.068.635	
242	132.050.204.003	1-2	AC Unit/ Pendingin Ruangan	2018	Sharp	1 PK	Besi, Plastik			APBD Kab.	8.800.000	
243	132.050.204.003	1	AC Unit	2019	Panasonic	1 PK	Besi			APBD Kab.	5.650.000	
244	132.050.204.004	1-15	Pendingin Ruangan (AC)	2018	MIDEA	2,5 PK	Besi, Plastik			APBD Kab.	142.500.000	
245	132.050.204.004	1	Pendingin Ruangan (AC)	2019	MIDEA	2 PK	Besi, Plastik			APBD Kab.	8.200.000	
246	132.050.204.004	2	A.C. Split	2019	LG	2PK				Hibah	9.850.000	MPP
247	132.050.204.004	3-4	A.C. Split	2019	SHARP	1,5 PK	Besi, mika			Hibah	11.500.000	MPP
248	132.050.204.004	1-5	AC Split	2020	Daikin	1,5 PK	Besi			APBD Kab.	39.000.000	
249	132.050.204.004	6-9	AC	2020	Daikin	1,5 PK	Besi			APBD Kab.	31.300.000	
250	132.050.204.004	3	A.C. Split	2021	Daikin	1 PK	Plastik			APBD Kab.	7.300.000	
251	132.050.204.004	1	A.C. Split	2023	Panasonic		Plastik, Besi			APBD Kab.	6.650.000	
252	132.050.204.004	2-6	A.C. Split	2023	PANASONIC		Plastik, Besi			APBD Kab.	46.250.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
253	132.050.204.004	1	A.C. Standing	2024	POLYTRON	3 PK	Plastik, Besi			APBD Kab.	14.950.000	AC Standing Dinkes Dinsos MPP
254	132.050.204.005	1	Alat Pendingin (Kulkas)	1899	Sharp	1 Pintu	Plastik, Besi			APBD Kab.	4.000.000	
255	132.050.204.006	1-2	Kipas Angin	2011	Panasonic		Mika			APBD Kab.	1.200.000	
256	132.050.204.007	1-2	Exhaust Fan	2020	Krisbow	10 M	Besi, Plastik			APBD Kab.	16.800.000	
257	132.050.204.007	1-2	Exhaust Fan	2024	Panasonic	19 x 39 x 41 cm	Plastik			APBD Kab.	1.870.000	
258	132.050.204.007	3-4	Exhaust Fan	2024	Panasonic	19 x 39 x 41 cm	Plastik			APBD Kab.	1.870.000	
259	132.050.204.015	1-5	Pendingin Ruangan (AC) Standing AC	2019	MIDEA MFGB-24CRN1	3 PK	Besi, Plastik			APBD Kab.	78.750.000	
260	132.050.204.015	6-9	Air Curtain	2019	Gree	1.25-9K	Besi, Plastik			APBD Kab.	18.800.000	
261	132.050.204.015	10	Air Cooler	2019	Kris	Kecil	Plastik			APBD Kab.	999.900	
262	132.050.205.002	2	Kompas Gas (Alat Dapur)	2021	RI		Plastik			APBD Kab.	921.500	
263	132.050.205.002	1	Gas Roaster	2022	Tanpa Merk		Alumunium			APBD Kab.	1.021.000	Kompas dan Selang
264	132.050.206.002	1	Televisi LED 60 Inchi	2018	Sharp	60 Inchi	Plastik			APBD Kab.	23.380.000	
265	132.050.206.002	2-4	TV LED 40 Inchi	2018	TOSHIBA	40 Inchi	Besi, Plastik			APBD Kab.	13.800.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
266	132.050.206.002	1	TV LED	2019	Sony Bravia	70 Inch	Besi, Plastik			APBD Kab.	48.510.000	
267	132.050.206.002	2	Televisi	2019	TOSHIBA	40 Inchi	Besi, Plastik			APBD Kab.	5.100.000	
268	132.050.206.002	3-4	Televisi	2019	Thosiba	40 inc	Mica			Hibah	9.220.000	MPP
269	132.050.206.002	1	Televisi	2020	Sony	65"	Besi, Plastik			APBD Kab.	31.000.000	
270	132.050.206.002	2	Televisi	2020	Coocaa	24"	Besi, Plastik			APBD Kab.	975.000	
271	132.050.206.002	3-4	Televisi	2020	TCL	50 "	Besi, plastik			APBD Kab.	12.432.000	
272	132.050.206.002	2	Televisi	2021	Sharp	50 "	Plastik			APBD Kab.	7.480.000	
273	132.050.206.002	3	Televisi LED	2021	POLYTRON	50 Inch	Plastik			APBD Kab.	7.450.000	
274	132.050.206.002	3-5	Televisi	2023	POLYTRON		plastik, besi			APBD Kab.	18.150.000	Smart TV
275	132.050.206.005	1	Portable Wireless Amplifier	2009	TOA		Plastik			APBD Kab.	3.200.000	
276	132.050.206.005	1	Amplifier	2019	TOA		mesin			Hibah	9.000.000	MPP
277	132.050.206.007	6-15	Compact Speaker	2018	30W		Campuran			APBD Kab.	10.500.000	+Ongkos Pasang
278	132.050.206.007	1-3	Loudspeaker (Horn)	2019	TOA		Besi			APBD Kab.	2.250.000	
279	132.050.206.007	4-7	Coloum Speaker	2019	TOA		Besi			APBD Kab.	3.800.000	
280	132.050.206.007	8-9	Compact Speaker	2019	TOA		Plastik			APBD Kab.	1.650.000	
281	132.050.206.007	10-11	Loudspeaker	2019	TOA					Hibah	3.000.000	MPP
282	132.050.206.008	1	Salon Meeting	2019	NOISE		Besi, Plastik			APBD Kab.	2.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
			Portable Noise									
283	132.050.206.008	1	Audio Sound System	2020	AAA TANAKA	2 (dua) salon	Besi, plastik			APBD Kab.	1.505.000	
284	132.050.206.008	1-2	Sound System	2023	Tanpa merk					APBD Kab.	49.000.000	
285	132.050.206.014	1	Chime Microphone	2018	ZM100E C		Besi			APBD Kab.	1.700.000	
286	132.050.206.014	1-5	Desk Geosnect Microphone (Mic Meja)	2019	TOA		Plastik			APBD Kab.	4.300.000	
287	132.050.206.014	6	Microphone	2019	TOA					Hibah	1.000.000	MPP
288	132.050.206.021	1-10	IR Camera Dome	2018	CCTV HD	2 MP				APBD Kab.	8.600.000	+Ongkos Pasang
289	132.050.206.021	11-16	IR Camera Bullet	2018	CCTV HD					APBD Kab.	5.340.000	+Ongkos Pasang
290	132.050.206.023	1	Foto Tustel	2003	Nixon		Fiber			APBD Kab.	3.458.000	
291	132.050.206.028	1	Lambang Garuda Pancasila	2003			Kertas			APBD Kab.	50.000	
292	132.050.206.029	1	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2003			Kertas			APBD Kab.	50.000	
293	132.050.206.032	1	Tiang Papan Petunjuk Arah	2018			Besi			APBD Kab.	2.500.000	
294	132.050.206.034	1-2	Alat Ukur Kepuasan Masyarakat	2018		3 Tombol	Plastik			APBD Kab.	9.000.000	
295	132.050.206.037	1	Kaca Hias	2003		0,6 x 0,9	Kaca			APBD Kab.	50.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
296	132.050.206.037	1	Kaca Hias	2005		49 x 50 Cm	Kaca			APBD Kab.	50.000	
297	132.050.206.038	1	Dispencer	2010	SANKEN	3 Kran	Mika			APBD Kab.	1.500.000	
298	132.050.206.038	1	Dispencer	2014	Denpoo		Campuran			APBD Kab.	1.714.900	
299	132.050.206.038	1	Dispencer	2017	Low Watt Denpo DDK-1105	Panas, Dingin & Normal	Campuran			APBD Kab.	1.000.000	
300	132.050.206.038	1	Dispencer	2018	Denpo		Plastik			APBD Kab.	925.000	
301	132.050.206.038	2	Dispencer	2018	Miyako		Plastik			APBD Kab.	836.500	
302	132.050.206.038	1-5	Dispencer	2019	Miyako	Panas, Dingin & Normal	Besi, Plastik			APBD Kab.	4.448.500	
303	132.050.206.038	4-13	Dispencer	2020	Miyako	19 Lt	Plastik			APBD Kab.	14.500.000	
304	132.050.206.038	2	Dispenser	2021	Arisa	350 x 370 x 1030 mm	Plastik			APBD Kab.	1.750.500	
305	132.050.206.038	1	Dispenser	2022	ARISA	3 Tombol	Plastik			APBD Kab.	1.750.500	Toko MAKMUR BAHAGIA
306	132.050.206.058	1	Vertikal Blind	2022	Tanpa Merk	45	Plastik			APBD Kab.	22.500.000	CV OKINAWA IBRAHIM GROUP
307	132.050.206.058	2	Vertikal Blind	2022	Tanpa Merk	55 Meter	Plastik	0		APBD Kab.	27.500.000	CV. OKINAWA

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
												IBRAHIM GROUP
308	132.050.206.077	1	Aqua Galon	2003		19 Liter	Plastik			APBD Kab.	75.000	
309	132.050.206.077	1	Meteran Jalan	2011	Walking Measure		Plastik			APBD	725.000	
310	132.050.206.077	1	Tape Mobil	2014			Campuran			APBD Kab.	5.400.000	
311	132.050.206.077	1	Troly/ Foldable Handtruck 300 Kgsmall	2015	Krisbow	300 Kgsmall	Campuran			APBD Kab.	513.000	
312	132.050.206.077	1	Antena Parabola KU Band	2017	SKYBOX		Campuran			APBD Kab.	600.000	
313	132.050.206.077	4	Kitchen Set	2017			Multiplek			APBD Kab.	10.340.000	
314	132.050.206.077	1	Generator Diesel HD25KVA Silent Cum Gross Weight 1300 Kg, Dimension.	2018	Silent	66.000 Whatt	Besi, Kabel			APBD Kab.	177.638.000	
315	132.050.206.077	2	Papan Nama Kantor	2018		55 cmx18 h, 35 cm x 17 h	Besi, Plastik			APBD Kab.	39.700.000	
316	132.050.206.077	3-6	Free HP Charger	2018	Panasonic		Plastik			APBD Kab.	14.500.000	
317	132.050.206.077	7-12	Korden	2018	Vertical Blind	120 m2	Campuran			APBD Kab.	30.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
318	132.050.206.077	13	Troli Arsip	2018			Besi			APBD Kab.	1.136.000	
319	132.050.206.077	1	Tralis Tangga Selatan MPP	2019			Besi			APBD Kab.	4.270.000	
320	132.050.206.077	2	Tralis Tangga Utara MPP	2019			Besi			APBD Kab.	9.330.000	
321	132.050.206.077	3	Tralis Ruang Rapat 3 MPP	2019			Besi			APBD Kab.	6.900.000	
322	132.050.206.077	4-5	Poster Bening Akrilik Area Bebas Rokok	2019		30 X 40 cm	Acrylic			APBD Kab.	1.000.000	
323	132.050.206.077	6-10	Alat Pengharum Ruangan MPP	2019	Ecocare		Plastik			APBD Kab.	3.300.000	
324	132.050.206.077	2	Saving Box	2020	Nakas	L. 0,94,W. 0,27H. 0,44	Multiple k fisnied HPL, Tacosh			APBD Kab.	3.144.300	
325	132.050.206.077	1	Stabiliser Camera	2021	ZHIYUN WEEBIL L-S		Plastik			APBD Kab.	7.150.000	CV TRIPIO COMPUTE R
326	132.050.207.001	1-2	Alat Pemadam/P ortable	2012	GUNNE BO	6 Kg	Besi			APBD Kab.	3.000.000	
327	132.050.301.006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017		Biro	Kayu Finishing Melamin e			APBD Kab.	3.400.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
328	132.050.301.009	1-3	Meja Kerja Locket & Meja Komputer	2007			Campuran			APBD Kab.	7.950.000	
329	132.050.301.009	1-2	Meja Kerja	2009			Kayu			APBD Kab.	4.902.000	Meja Kasir
330	132.050.302.006	1	Meja Tamu	2021	Tanpa merk	1,2 m x 0,6 m x 0,45 m	Kayu, Kain			APBD Kab.	4.218.125	
331	132.050.303.001	1	Kursi Kerja	2021	Importa	Engkel Tangana n	Besi, Kain			APBD Kab.	1.350.000	
332	132.050.303.005	1-2	Kursi Kerja Pejabat	2024	Ergotec 508-T		Plastik, Besi			APBD Kab.	4.850.000	
333	132.050.303.008	1-11	Kursi Kerja Pegawai	2021	Office Chair	51 x 44,5 x 49 cm	Plastik dan busa			APBD Kab.	9.900.000	
334	132.050.303.008	1-6	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2023	Ergotec 872 SN		Kulit, Busa, Besi			APBD Kab.	8.820.000	Kursi Staf 872 SN senderen bolong-bolong
335	132.050.303.009	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon	2003			Kayu			APBD Kab.	300.000	
336	132.050.303.009	1-10	Kursi Rapat Pejabat	2018	DUMA INDONE SIA	1 orang	Besi, Busa			APBD Kab.	15.000.000	
337	132.050.306.013	1	Meja Kursi Tamu	2005			Kayu			APBD Kab.	3.000.000	
338	132.060.101.005	1	Mixer Amplifier	2018			Campuran			APBD Kab.	4.200.000	
339	132.060.101.036	1	Wireless Microphone	2018	Crimson		Besi			APBD Kab.	700.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
340	132.060.101.048	3	Unintemuptible Power Supply (UPS) + Stabilizer	2009			Seng			APBD Kab.	1.700.000	
341	132.060.101.048	1-5	APS UPS SMC1000I	2018	APC	600W	Besi			APBD Kab.	29.500.000	
342	132.060.101.059	1	Power Amplifier	2019	TOA	120 W	Besi			APBD Kab.	2.875.000	
343	132.060.101.059	2	Mixer Amplifier	2019	TOA	30 W	Besi			APBD Kab.	925.000	
344	132.060.101.071	1	Tape Mobil	2014			Campuran			APBD Kab.	4.000.000	Di mobil R 36 A
345	132.060.101.096	1	LCD Projector + Layar Motorize 70"	2014	Focus	Layar motorize 70 " Focus				APBD Kab.	10.750.000	
346	132.060.101.096	1-3	Epson Projector EB-W05	2018	EPSON	WXGA (1200 X 800)	Besi, Kain			APBD Kab.	21.561.000	
347	132.060.101.096	1	Video Mikro Rode Microphone	2019	Rode	Body : Dc04323 33	Besi, Plastik			APBD Kab.	900.000	
348	132.060.101.096	3	Camera Digital	2019	Canon		Plastik			APBD Kab.	8.300.000	
349	132.060.101.096	4	Layar LCD Proyektor	2019	Brite Motorized	84"	Besi, Kain			APBD Kab.	4.400.000	
350	132.060.101.096	1-2	Camera CCTV Ruang Imigrasi	2020	Hikvision	2 MP	Plastik			APBD Kab.	1.925.000	
351	132.060.102.003	1	Camera Electronic	2012		16,2 Megapixel	Campuran			APBD Kab.	18.500.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
352	132.060.102.011	1	Central DVR Unit 16 Channel	2018	HD		Campuran			APBD Kab.	2.700.000	
353	132.060.102.038	1	Centralized Power Supply	2018	Box		Besi			APBD Kab.	700.000	
354	132.060.102.126	1	Camera Digital	2019	CANON		Mika			Hibah	8.000.000	MPP
355	132.060.104.045	1	Mesin Barcode Scanner	2022	Omni	480 CMOS	Plastik			APBD Kab.	1.254.500	
356	132.060.105.047	1	Drone	2023	DJI DJI	20Mp	Plastik			APBD Kab.	23.300.000	
357	132.060.201.001	1	Telephone (PABX)	2019	Panasonic		Plastik			APBD Kab.	15.550.000	
358	132.060.201.003	1	Pesawat Telephone Digital proprietary	2019	Panasonic	48 Key	Plastik			APBD Kab.	7.375.000	
359	132.060.201.003	2-26	Pesawat Telephone Single Line	2019	Panasonic		Plastik			APBD Kab.	15.375.000	Telephone+ Grounding +Pasang
360	132.060.201.010	1-3	Faksimile	2018	Panasonic		Plastik			APBD Kab.	5.000.000	
361	132.060.201.022	1	PABX	2008			Besi			APBD Kab.	11.250.000	
362	132.060.201.022	1	Global Positioning System (GPS)	2013	GARMIN		campuran			APBD Kab.	5.280.000	
363	132.080.111.030	1	Thermometer Infrared	2020	Polygreen		Plastik			APBD Kab.	1.100.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
364	132.080.111.125	1	Tripod	2023	Tanpa MERK		Plastik, Besi			APBD Kab.	500.000	
365	132.080.111.125	2	Tripod 96"	2023	Tanpa merk		plastik, besi			APBD Kab.	1.240.000	
366	132.080.133.010	1	Exhaust Fan	2023	SIUONH ATA					APBD Kab.	900.000	penyedot angin ruang laktasi
367	132.080.141.192	1-12	Personal Computer	2019	HP	21,5 Inc	Mika			Hibah	125.400.000	MPP
368	132.080.156.081	1-3	Meja Kerja	2019	TM	120x60x75	Finising HPL			Hibah	8.250.000	MPP
369	132.080.301.003	1	Papan Penunjuk Arah Dan Penunjuk Ruangan	2019		12,5cmx60cm, 12,5cmx80cm, 12,5cm	Akrilik			APBD Kab.	5.923.900	
370	132.080.301.003	2-18	Papan Akrilyc Siluet Bawor "Jenis Layanan"	2019			Akrilik			APBD Kab.	13.175.000	
371	132.080.301.003	19-20	Papan Akrilyc "Jadwal Layanan MPP"	2019			Akrilik			APBD Kab.	1.550.000	
372	132.080.305.066	1	Termos Air Panas	2018	Water Jug					APBD Kab.	517.500	
373	132.080.305.066	2	Termos Air Panas	2018			Plastik			APBD Kab.	510.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
374	132.080.309.004	1	Alat Peraga Edukasi Playmat	2018			Plastik			APBD Kab.	1.906.200	
375	132.080.309.004	1	Alat Peraga Edukasi Playmat	2019	Labeille		Plastik			APBD Kab.	1.300.000	
376	132.080.803.004	1	Software Antrian Online	2022	Tanpa Merk					APBD Kab.	68.409.500	
377	132.090.110.015	1-2	Dispencer	2023	POLYTRON		Plastik, Besi			APBD Kab.	6.500.000	Putih
378	132.100.101.002	1	Komputer (Mini PC)	2021	Samsung	19"	Plastik, Besi			APBD Kab.	11.935.000	
379	132.100.101.002	1	Mini PC	2022	CK2	512 Gb	Plastik			APBD Kab.	7.715.000	+ Softw
380	132.100.102.001	1	Personal Computer Unit (PC)	2012	LG	500 GB	Campuran			APBD Kab.	7.500.000	
381	132.100.102.001	1	Personal Computer Unit (PC)	2013	SAMSUNG		campuran			APBD Kab.	7.700.000	
382	132.100.102.001	1-6	Personal Computer Unit (PC)	2014	ACER	2 GB DDR3 Hard Disk 500 GB	Campuran			APBD Kab.	26.000.000	
383	132.100.102.001	7-9	Personal Computer Unit (PC)	2014	Lenovo		Campuran			Hibah	26.378.350	
384	132.100.102.001	1-7	Personal Computer Unit (PC)	2016	HP		Campuran			APBD Kab.	47.425.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
385	132.100.102.001	1-2	Personal Computer Unit (PC)	2017	Asus		Campuran			APBD Kab.	15.600.000	
386	132.100.102.001	1-2	Personal Computer Unit (PC) All In One	2018	HP	19,5 "	Besi, Plastik			APBD Kab.	15.980.000	
387	132.100.102.001	3-8	HP AIO 24-f0051d (3JV73AA) [3JV73AA]	2018	HP	23,8"	Besi, Plastik			APBD Kab.	75.224.880	
388	132.100.102.001	1-2	Computer HP PC AIO	2019	HP	22"	Besi, Plastik			APBD Kab.	17.600.000	
389	132.100.102.001	3	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	HP	21,5"	Plastik			APBD Kab.	12.000.000	
390	132.100.102.001	4	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	HP	23,8"	Plastik			APBD Kab.	12.000.000	
391	132.100.102.001	5-6	P.C Unit/standin g	2019	TOUCHI NDO	19 Inc	Mika			Hibah	14.000.000	MPP
392	132.100.102.001	1-6	PC All In One	2020	DELL	21,5 Inch FHD	Besi, plastik			APBD Kab.	69.600.000	
393	132.100.102.001	7	PC All In One Touchscreen	2020	HP	17 "	Besi, Plastik			APBD Kab.	10.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
394	132.100.102.001	10	PC All in One	2021	Acer	22 INCH	Plastik, Kaca	DQBG6 SN0 031360 39C 33000		Hibah	12.045.000	BENTUK APRESIASI KEPADA 40 NOMINE ATAS PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BE
395	132.100.102.001	1-6	PC AIO	2023	ACER	21.5"	Plastik dan besi			APBD Kab.	59.400.000	
396	132.100.102.001	1	PC All In One	2024	Acer	21,5 Inch	Plastik, Besi			APBD Kab.	23.750.000	
397	132.100.102.002	2	Lap Top / Note Book	2014	ACER	Monitor 14 " 2 GB DDR3				APBD Kab.	7.800.000	
398	132.100.102.002	1	Lap Top	2015	ASUS					Pembelian	6.900.000	
399	132.100.102.002	2	Lap Top	2015	ASUS					APBD Kab.	6.900.000	
400	132.100.102.002	2	Lap Top	2017	Acer E5-475G		Campuran			APBD Kab.	6.400.000	
401	132.100.102.002	1-2	Lap Top	2019	HP	14 "	Besi, Plastik			APBD Kab.	15.800.000	
402	132.100.102.002	4	Lap Top	2019	HP	14 "	Besi, Plastik			APBD Kab.	7.900.000	
403	132.100.102.002	5	Lap Top	2019	ASUS	14 Inch	Besi, Plastik			APBD Kab.	17.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
404	132.100.102.002	1-2	Lap Top	2020	Lenovo	14"	Besi, Plastik			APBD Kab.	16.000.000	
405	132.100.102.002	3	Lap Top	2020	Lenovo	14 Inch HD	Besi, plastik			APBD Kab.	6.650.000	
406	132.100.102.002	1-4	Lap Top	2021	Lenovo	14"	Plastik, Kaca			APBD Kab.	65.780.000	
407	132.100.102.002	5-6	Lap Top	2021	Lenovo	15,6 Inch	Plastik, Kaca			APBD Kab.	36.478.200	
408	132.100.102.002	7	Lap Top	2021	Acer TMP214-52-INT EL CORE 17-1	14 INCH	Plastik, kaca			Hibah	16.100.000	
409	132.100.102.002	8-9	Lap Top	2021	Acer TMP214-52-INT EL CORE 17-1	14 INCH	Plastik, Kaca			Hibah	32.200.000	PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2021 ANTAR
410	132.100.102.002	11	Lap Top	2021	ASUS	17 Inch	Besi, Plastik			APBD Kab.	18.630.000	
411	132.100.102.002	12-22	Lap Top	2021	ASUS	15 Inch	Besi, Plastik			APBD Kab.	163.130.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
412	132.100.102.002	1-5	Lap Top	2023	ACER	14"	Plastik			APBD Kab.	49.875.000	
413	132.100.102.002	6	Lap Top	2023	LENOVO	12.4"	PLastik			APBD Kab.	22.250.000	
414	132.100.102.002	1	Lap Top	2024	HP	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	9.950.000	Puspa
415	132.100.102.002	2	Lap Top	2024	HP	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	9.950.000	Lina
416	132.100.102.002	3	Lap Top	2024	ACER	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	14.700.000	Warna Abu (Steel Grey) - Faizal Isma Adhi
417	132.100.102.002	4	Lap Top	2024	ACER	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	14.700.000	Warna Abu (Steel Grey) - Prihantina Setyaningrum
418	132.100.102.002	5	Lap Top	2024	ACER	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	14.700.000	Warna Abu (Steel Grey) - Ana Rhomadlon
419	132.100.102.002	6	Lap Top	2024	ACER	14 Inch	Plastik, besi			APBD Kab.	14.700.000	Warna Abu (Steel Grey) - Jerimia Saputra
420	132.100.102.003	2	Laptop	2011	Dell		Campuran			APBD Kab.	10.450.000	
421	132.100.102.003	4-6	Note Book	2011	Toshiba	14 Inch	Campuran			APBD Kab.	15.000.000	
422	132.100.102.003	3	Note Book	2012		4GB DDR3PC-106 00	Campuran			APBD Kab.	10.800.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
423	132.100.102.003	5	Note Book / Ipad	2013	Samsun g		campura n			APBD Kab.	5.500.000	
424	132.100.102.003	6-8	Note Book	2014	TOSHIB A		Campura n			APBD Kab.	14.100.000	
425	132.100.102.003	1-2	Note Book	2016	HP	14"	Campura n			APBD Kab.	11.500.000	
426	132.100.102.003	2	Note Book	2018	HP Business	14" HD	Besi, Plastik			Hibah	10.757.000	
427	132.100.102.003	1	Samsung Tab S4 - Gray	2019	Samsun g	S4	Besi, Plastik	351812 /10/0 077751 2		APBD Kab.	10.499.000	
428	132.100.102.003	2-3	Note Book/Laptop	2019	ASUS	14 inc	mika			Hibah	18.000.000	MPP
429	132.100.102.003	2-7	Tablet	2020	Samsun g	8.0"	Besi, Plastik			APBD Kab.	29.770.500	
430	132.100.102.010	1	Scaner	2018	CANON	A4	Plastik			APBD Kab.	1.900.000	
431	132.100.103.001	1-3	UPS	2014	Power Ware					Hibah	5.604.720	
432	132.100.103.001	1-2	UPS	2019	Prolink	1500 VA	Besi, Plastik			APBD Kab.	5.800.000	
433	132.100.201.012	1-2	Harddisk Eksternal	2014	EXPANS ION	15,5 mm				APBD Kab.	2.300.000	
434	132.100.201.012	1-2	Harddisk External	2018	TOSHIB A	500 GB	Besi			APBD Kab.	1.800.000	
435	132.100.201.012	3	Harddisk Eksternal	2018	HD Ext	1 TB				APBD Kab.	775.000	
436	132.100.201.012	4	Harddisk Memory	2018	WD	4 GB	besi			APBD Kab.	2.500.000	
437	132.100.201.012	1	Harddisk External	2019	Seagate	500 GB				APBD Kab.	770.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
438	132.100.201.012	2	Harddisk External	2019	Seagate	500 GB	Besi, Plastik			APBD Kab.	770.000	
439	132.100.201.012	3	Harddisk External	2019	Seagate	500 GB	Plastik			APBD Kab.	770.000	
440	132.100.201.012	1	Harddisk	2020	Portable	1 TB	Besi, Plastik			APBD Kab.	755.000	
441	132.100.201.012	2	Harddisk External	2020	Passport	1 TB	Besi, Plastik			APBD Kab.	740.000	
442	132.100.201.012	3	Harddisk Exsternal	2020	WD	1TB	Besi			APBD Kab.	775.000	
443	132.100.201.012	4	Harddisk CCTV Ruang Imigrasi	2020	Seagate	500 GB	Plastik			APBD Kab.	660.000	
444	132.100.202.017	4	Printer	2008	Canon		Besi			APBD Kab.	730.000	
445	132.100.202.017	1	Printer	2009	Dot Matrik A4,Tinta A3 CIS/Inf		Besi			APBD Kab.	8.000.000	
446	132.100.202.017	1	Printer	2010	EPSON		Campuran			APBD Kab.	2.100.000	
447	132.100.202.017	2-4	Printer	2011	CANON PIXMA iP 2770		Campuran			APBD Kab.	1.200.000	
448	132.100.202.017	1-6	Printer	2012		4800 x 1200 dpi				APBD Kab.	3.900.000	
449	132.100.202.017	1-2	Printer	2017	Epson		Campuran			APBD Kab.	5.800.000	
450	132.100.202.017	1-6	Printer	2018	Canon		Plastik			APBD Kab.	13.395.360	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
451	132.100.202.017	1-2	Printer	2019	CANNON		Besi, Plastik			APBD Kab.	2.100.000	
452	132.100.202.017	3-4	Printer Dot Matrix	2019	Epson	65 / 78 / 55 / 47 / 56 / cps	Plastik			APBD Kab.	7.000.000	
453	132.100.202.017	1	Printer	2020	Canon	F4	Besi, plastik			APBD Kab.	2.500.000	
454	132.100.202.017	2-5	Printer EPSON L3110	2020	EPSON	A4 : 5760 x 1440 dpi	Besi			APBD Kab.	11.600.000	
455	132.100.203.002	1	Monitor Display	2018	Panasonic	43"				APBD Kab.	6.200.000	
456	132.100.203.002	1-20	Monitor	2022	Inforce	15,6"	Plastik			APBD Kab.	27.000.000	
457	132.100.203.002	1-16	Monitor	2023	inforce					APBD Kab.	18.240.000	inforce + bracket & HDMI 15,6"
458	132.100.203.003	3	Printer	2014	HP		Campuran			APBD Kab.	1.400.000	
459	132.100.203.003	4	Printer	2014	HP	A4, 600 x 600 dpi	Campuran			APBD Kab.	5.000.000	
460	132.100.203.003	1	Printer Laser Jet	2015	HP					APBD Kab.	1.600.000	
461	132.100.203.003	1-5	Printer	2016	Epson	A4, 5 x 64 760 1440 dpi	Campuran			APBD Kab.	11.800.000	
462	132.100.203.003	1-3	Printer Scanner	2018	EPSON	A4	Plastik			APBD Kab.	8.700.000	
463	132.100.203.003	1	Printer	2019	Canon		Plastik			APBD Kab.	1.143.453	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
464	132.100.203.003	2-4	Printer	2019	Epson		Plastik			APBD Kab.	8.456.547	
465	132.100.203.003	5-12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Epson	F4	Mika			Hibah	13.600.000	MPP
466	132.100.203.003	13-15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	EPSON	F4	Mika			Hibah	10.200.000	MPP
467	132.100.203.003	16-17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	CANON	F4/Laser	Mika			Hibah	10.400.000	MPP
468	132.100.203.003	1	Printer	2020	Epson		Plastik			APBD Kab.	2.300.000	
469	132.100.203.003	1-4	Printer	2023	EPSON		Plastik			APBD Kab.	23.476.000	
470	132.100.203.003	5-7	Printer	2023	HP					APBD Kab.	15.630.000	
471	132.100.203.003	1-3	Printer	2024	EPSON		Plastik, besi			APBD Kab.	17.700.000	
472	132.100.203.004	1	Scanner Epson DS-50000	2018	Epson	A3	Besi, Plastik			APBD Kab.	23.794.680	
473	132.100.203.004	2-3	Scanner Epson DS-6500	2018	Epson	A4	Besi, Plastik			APBD Kab.	29.026.240	
474	132.100.203.004	1-2	Scanner F1 7180	2019	FUJITSU	fi-7180	Besi, Plastik	[F1-7180][P AO3670 -B0 01]		APBD Kab.	70.000.000	

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
475	132.100.203.004	3	Scanner	2019	EPSON	A3	Besi, Plastik			APBD Kab.	24.550.000	
476	132.100.203.004	1-3	Scanner	2023	EPSON		Plastik			APBD Kab.	34.821.000	
477	132.100.203.004	1	Scanner (Book Scanner)	2024	CZUR		Plastik, besi			APBD Kab.	11.500.000	Scanner berdiri
478	132.100.203.007	1-2	Hardisk External	2019	Seagate	1 TB	Besi			APBD Kab.	1.694.000	
479	132.100.203.017	1-4	Hardisk	2021	External	500 GB				APBD Kab.	3.680.000	
480	132.100.203.017	1-4	External Hardisk 1 TB	2024	WD	1 TB	Plastik			APBD Kab.	4.040.000	Warna Putih Hitam
481	132.100.203.018	1	LCD Proyektor	2005	Toshiba		Besi			APBD Prov.	20.000.000	
482	132.100.203.018	1	Printer Scanner Copy	2015			Campuran			APBD Kab.	3.000.000	v
483	132.100.204.001	1	Server	2012		32 GB (6 DIMMs)	Campuran			APBD Kab.	23.750.000	
484	132.100.204.002	1	Router	2020	Wireless	932C	Besi, Plastik			APBD Kab.	595.000	
485	132.100.204.004	1	Modem wifi	2021	ADVAN	Cepat	Plastik	ACPE20000 TZ0016526		Hibah	724.900	BENTUK APRESIASI KEPADA 40 NOMINE ATAS PENILAIAN KINERJA PTSP DAN KINERJA PERCEPAT

No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor		Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
								Pabrik	Polisi			
												AN PELAKSANAAN
486	132.100.204.033	1	Peralatan Jaringan Komputer	2009	Toshiba		Campuran			APBD Kab.	37.070.000	
487	132.100.204.033	2	Kabel UTP	2010	Tyco electronic					Hibah	935.000	
488	132.100.204.033	1	Peralatan Jaringan Komputer	2011						APBD	1.500.000	
489	132.100.204.033	1	DVR CCTV Ruang Imigrasi	2020	DVR 4 Chanel	2 MP	Plastik			APBD Kab.	880.000	
490	132.170.119.004	1	Jet Pump	2024	Wasser Pump		Plastik, Besi			APBD Kab.	1.650.000	Turn Air disebelah Kantin
JUMLAH											7.641.758.907	

Sumber : KIB B DPMPSTSP Kab. Banyumas, 2024.

B. ASET BANGUNAN

No.	Kode Barang	Reg ister	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Kon disi Bang unan (B, KB,R B)	Nomor		Luas Lanta i (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul / Cara	Harga Rp.	Ketera ngan
						Bertin gkat Tidak	Beto n/ tida k			Tang gal	Nomor						
1	133.010.101.001	1	Banguna n Gedung Kantor Permanen	2008	B	Berting kat	Beto n	520,18	lLn. Jend Sudirman 540			520,18	Hak Pakai	04.01.00.00.131010101003.1996.2	APB D Kab.	1.111.484.305	Gedun g A
2	133.010.112.004	1	Gedung Mal Pelayana n Publik Kabupate n Banyuma s	2017	B	Tidak	Be ton	2592	Purwokert o			2592	Hak Pakai		APB D Kab.	10.797.207.596	ke Dinas Penan aman Modal
3	133.010.112.004	1	Pemeliha ran Sarana dan Prasarana Gedung MPP Kabupate n Banyuma s	2023	B	Tidak	Be ton	30	Jalan Dr.Angka No 45 Purwokert o	44957	027/023/2023	30	Hak Milik		APB D Kab.	14.357.850	CV. WIDJA JANTO KONTR UKSI SARAN A
4	133.010.113.001	1	Gedung Pos Jaga	2023	B	Tidak	Be ton	2,25	JL. Dr. Angka NO 45			2,25	Hak Pakai		APB D Kab.	25.496.700	

No.	Kode Barang	Reg ister	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Nomor		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
						Bertingkat Tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor						
			Permanen (MPP)						Purwokerto (MPP)								
5	133.010.130.005	1	Backdrop ruang PAP	201	B	Tidak	Tidak	1	MPP	18/03/0201	BA.514/PPTK PKK-PPTKL N/III/2019	15	Hak Guna Bangun		Hibah	18.450.000	
6	133.010.130.005	1	Kanopi Ruang Advis Planing	2012	B	Tidak	Tidak	24	BPMPP Kabupaten Banyumas			24	Hak Pakai	04.01.00.00.131010101003.1996.2	APB D Kab.	5.000.000	
7	133.010.130.005	1	Backdrop Ruang Pelayana n	2019	B	Tidak	Tidak	1	MPP	43542	BA.514/PPTK PKK-PPTKL N/III/2019	25	Hak Guna Bangun		Hibah	29.520.000	MPP
JUMLAH																12.001.516.451	

Sumber: KIB C Data Aset DPMPTSP Kab. Banyumas, 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas tahun 2024 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja tersebut berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tahun 2024 yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 Peralihan. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan peringkat kinerja sebagai berikut:

1. Secara umum hasil penilaian 2 (dua) tujuan 2 (dua) sasaran, 3 sasaran tambahan 6 (enam) program, dan 12 (dua belas) Kegiatan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, menunjukkan bahwa diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja sampai akhir bulan Desember;
2. Capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja Tahun 2024 sebesar 162,05% (2 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran);
3. Capaian tujuan sebesar 136,92% (2 indikator tujuan);
4. Capaian sasaran sebesar 122,81% (2 Indikator sasaran/utama) sebesar 172,10% (5 indikator sasaran: 2 indikator utama 3 indikator tambahan);
5. Capaian kinerja program sebesar 155,21% (6 indikator program);
6. Capaian kinerja kegiatan sebesar 127,98% (12 indikator kegiatan);
7. Capaian kinerja sub kegiatan sebesar 203,32% (32 indikator sub kegiatan).

Sehingga prosentase realisasi keuangan sampai dengan akhir 31

Desember 2024 adalah 96,26%, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas pengukuran kinerjanya termasuk dalam kelompok kategori penilaian **Tercapai**.

Adapun Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dan kunci antara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi		Tingkat capaian		Keterangan
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2024	2025	2026	2024	2025 TW II	2024	2025 TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6 x 100)	10=(8/6x100)	11
1	IKM pelayanan terpadu satu pintu	%	91,3	90,75	91	91,72	91,71	100,79	100,78	Tercapai
2	Persentase perizinan terpadu satu pintu yang diterbitkan	%	96	96,5	97	100,18	100	103,28	103,09	Tercapai
3	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	96	96,5	97	100	100	103,09	103,09	Tercapai
4	Nilai Investasi Daerah	milyar	800	1600	2400	2.423	3988,856	100,96	166,20	Tercapai

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi		Tingkat capaian		Keterangan
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2024	2025	2026	2024	2025 TW II	2024	2025 TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6 x 100)	10=(8/6x100)	11
5	Persentase kegiatan usaha yang terealisasi investasinya	%	76	77	100	107,36	N/A	107,36	N/A	
6	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	96	96,5	100	100	47,22	100,00	47,22	Belum tercapai
7	Persentase Kegiatan Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	%	50	100	100	0	0	0	0	Perlu upaya pengendalian pencapaian kinerja
8	Persentase Calon Investor yang menerima promosi terfasilitasi penanaman modal yang membuat Lol	%	50	50	70	200	100	285,71	142,86	Tercapai

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi		Tingkat capaian		Keterangan
			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
			2024	2025	2026	2024	2025 TW II	2024	2025 TW II	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(7/6 \times 100)$	$10=(8/6 \times 100)$	11
9	Persentase realisasi investasi	%	95	96	97	211,18	142,46	217,71	146,87	Tercapai
10	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100	100	100	100		100,00	0,00	Tercapai

Sumber : DPMPTSP, 2025.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan DPMTSP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMTSP memberikan layanan di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta pelimpahan kewenangan Bupati Banyumas pengelolaan Mal Pelayanan Publik. Kelompok sasaran layanan pada DPMTSP adalah semua Pelaku Usaha, instansi vertikal, mahasiswa dan masyarakat.

2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra BKPM, Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan
 - a. Belum optimalnya SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas.
 - b. Belum optimalnya koordinasi antar unit di sekretariat
2. Permasalahan yang terkait dengan Peningkatan Iklim Investasi

- a. Jumlah pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif penanaman modal masih kurang
 - b. Peluang investasi yang ada di Kabupaten Banyumas masih kurang diketahui oleh masyarakat luas.
 - c. Data pelaku usaha besar dan UMKM sebagai dasar pelaksanaan kemitraan belum tersedia
 - d. Promosi penanaman modal secara digital belum dilaksanakan secara optimal
3. Permasalahan yang terkait dengan Promosi Penanaman Modal
- a. Promosi penanaman modal secara digital belum dilaksanakan secara optimal
4. Permasalahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan dan non perizinan
- a. Beberapa kegiatan dengan skala usaha diatas menengah yang eksisting saat ini tidak terbaca dalam RDTR.
 - b. Kurangnya informasi yang disediakan oleh Kementerian terkait kendala sistem OSS
 - c. Kurangnya informasi yang disediakan oleh Kementerian terkait kendala sistem MPP Digital
 - d. Beberapa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan belum sesuai dengan aturan terbaru
 - e. Keluhan terhadap aplikasi SIPANJIMAS yang sering terjadi error system, interface susah dipahami, kurang userfriendly, dan pengguna yang masih kurang memahami cara
 - f. Belum adanya regulasi penyelenggaraan perizinan perumahan di tingkat daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur secara detail dan kebutuhan akan pelayanan perizinan perumahan secara digital/tersistem
 - g. Belum adanya regulasi penyelenggaraan IPTPD di tingkat daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur secara detail
 - h. Adanya kebutuhan pengembangan Menu Izin Pemanfaatan

Tanah Pemerintah Daerah (IPTPD) pada aplikasi SIPANJIMAS dan kebutuhan penanda/identitas Objek Retribusi IPTPD namun masih terkendala terkait revisi Perda

5. Permasalahan yang terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Belum semua pelaku usaha melaksanakan LKPM karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dan ketidakpahaman pelaku usaha terhadap apa yang harus di laporkan
 - b. Sedikitnya pelaku usaha besar yang masuk di Kab. Banyumas dikarenakan belum adanya Kawasan Industri
 - c. Belum ada tindak lanjut yang signifikan atas hasil pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak/kurang sesuai terhadap ketentuan yang berlaku

2.5.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah **Peningkatan Nilai Investasi Daerah.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 2 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Misi ke 4 (dua) : Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi ke 6 (enam) : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Banyumas tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal.

3.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya nilai investasi daerah.

3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan struktur kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang memuat tujuan dan sasaran termasuk informasi mengenai indikator dan satuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	3,57	0,36	0,43	0,5	0,56	0,63	0,63
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Investasi Daerah	Milyar	1.400	1.405	1.411	1.418	1.426	1.435	8.495
		Nilai IKM penanaman modal	Angka	89,60	89,80	90	90,20	90,40	90,60	90,60
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,50	87,55	87,60	87,70	87,80	87,90	87,90
		Nilai IKM MPP	Angka	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, 2025.

3.3. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan realisasi investasi melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data dan sistem informasi penanaman modal
2. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal

Tahapan pembangunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Tahunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengoptimalkan realisasi investasi melalui promosi investasi secara online dengan media cetak dan elektronik serta promosi offline dengan mengikuti dan atau melaksanakan pameran investasi	Mengoptimalkan realisasi investasi melalui survey potensi dan peluang usaha	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan menumbuhkan hilirisasi produk agro	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan menumbuhkan investasi hijau	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan menumbuhkan beberapa sektor unggulan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengoptimalkan realisasi investasi dengan menyelesaikan permasalahan penanaman modal	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan meningkatkan kemitraan usaha besar dengan UMKM	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan mendukung tumbuhnya sentra usaha pada tiap kecamatan	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan mendukung tumbuhnya pengusaha muda	Mengoptimalkan realisasi investasi dengan memanfaatkan adanya kawasan industri
Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal dengan pengolahan dan pemanfaatan data elektronik	Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal dengan meningkatkan sistem mekanisme prosedur dan kecepatan waktu penyelesaian perizinan	Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal dengan inovasi baru		

Sumber: DPMPTSP Kab. Banyumas, 2025.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan investasi dengan :
 - a. Memanfaatkan seoptimal mungkin potensi unggulan daerah dengan penyusunan potensi investasi,
 - b. Mengoptimalkan kepeminatan investasi dengan penyusunan strategi promosi yang baik dan mengangkat potensi lokal
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan pelayanan prima dan inovasi perizinan

- d. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memfasilitasi dan membimbing para pelaku usaha dengan baik
 - e. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal dengan pengidentifikasian dan analisis kebutuhan data yang urgent
2. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal dengan peningkatan sarpras dan penggunaan layanan berbasis elektronik secara maksimal.

Keterkaitan antara arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP dan RPJMD Kab. Banyumas 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP
(1)	(2)
Pengembangan sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan	Merealisasikan investasi dengan : 1. Memanfaatkan seoptimal mungkin potensi unggulan daerah dengan penyusunan potensi investasi 2. Mengoptimalkan kepeminatan investasi dengan penyusunan strategi promosi yang baik dan mengangkat potensial local 3. Meningkatkan kualisasi pelayanan penanaman modal dengan pelayanan prima dan inovasi perizinan 4. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memfasilitasi dan membidangi para pelaku usaha dengan baik 5. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal dengan pengidentifikasian dan analisis kebutuhan data yang urgent

Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Mengoptimalkan kualitas pengelolaan investasi dan penanaman modal dengan peningkatan sarpras dan penggunaan layanan berbasis elektronik secara maksimal
---	---

Sumber: DPMPTSP Kab. Banyumas, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas. Program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan, dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan yang lebih spesifik, mikro, dan operasional.

4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan rumusan seperti pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
			Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Realisa si	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
Meningkatnya Nilai Investasi daerah				8.785.537. 713		9.547.66 8.532		9.911.05 0.000		10.111.90 0.000		10.399.80 0.000		10.676.00 0.000		10.811.200.0 00
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	N/A		N/A		0		0		1		1		1	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal				1.175.475. 150		747.980. 000		987.500. 000		1.007.300 .000		1.035.800 .000		1.063.000 .000		1.076.200.00 0
	Nilai Investasi Daerah	Miliar	1.353		1.40 0		1.40 5		1.41 1		1.41 8		1.42 6		1.43 5	

	Nilai IKM Penanaman Modal	Angka	N/A		90		90		90		90		90		91	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				184.948.610		74.740.000		100.000.000		147.000.000		104.900.000		107.600.000		108.900.000
	Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang dipromosikan	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						14.832.000		50.000.000		71.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
	Persentase tercapainya kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal	%	N/A		N/A		75		75		75		75		75	

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										20.000.000						
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	N/A		N/A		N/A		1		N/A		N/A		N/A	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						14.832.000		50.000.000		51.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	N/A		2		2		2		2		2		2	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				184.948.610		59.908.000		50.000.000		76.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
	Jumlah potensi investasi Kabupaten/Kota yang dikaji	Dokumen	N/A		N/A		1		1		1		1		1	

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				88.607.110		23.480.000				25.000.000						
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1		N/A		1		N/A		N/A		N/A	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				96.341.500		36.428.000		50.000.000		51.000.000		52.450.000		53.800.000		54.450.000
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				136.146.940		202.440.000		250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000
	Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepedinan investasi	%	N/A		N/A		50		71		71		88		88	

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				136.146.940		202.440.000		250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000
	Jumlah calon investor yang menyatakan kepedulian investasi (Lol)	Pelaku Usaha	6		6		6		7		7		8		8	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				5.900.000		42.720.000										
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1		1		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				130.246.940		159.720.000		250.000.000		210.000.000		262.200.000		269.100.000		272.500.000

	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	8		2		2		2		2		2		2	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				203.984.000		300.596.000		224.500.000		229.000.000		235.500.000		241.700.000		244.700.000
	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100		N/A		97		99		100		100		100	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				203.984.000		300.596.000		224.500.000		229.000.000		235.500.000		241.700.000		244.700.000

	Persentase Perizinan satu pintu yang diterbitkan	%	100		N/A		99		99		99		99		99	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				3.585.000		3.450.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.000.000		22.500.000
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.386		200		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				154.541.000		226.650.000		132.000.000		136.500.000		139.400.000		141.700.000		143.200.000

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	44.203		20.100		20.100		20.100		20.100		20.100		20.100	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				45.858.000		68.996.000		52.500.000		52.500.000		54.500.000		56.000.000		56.500.000
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	238		24		200		200		200		200		200	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						1.500.000		20.000.000		20.000.000		20.800.000		22.000.000		22.500.000
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A		2		2		2		2		2		2	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				646.217.600		155.404.000		393.000.000		400.900.000		412.300.000		423.200.000		428.500.000
	Persentase Proyek Penanaman Modal yang Memiliki Nilai Investasi dari LKPM yang disetujui	%	N/A		N/A		23		35		47		59		71	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				646.217.600		155.404.000		393.000.000		400.900.000		412.300.000		423.200.000		428.500.000

	Persentase Pelaku Usaha kecil, menengah dan besar berijin yang memperoleh fasilitasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	N/A		N/A		21		32		43		54		65	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				51.195.000		38.205.000		50.000.000		52.000.000		55.000.000		57.000.000		60.000.000
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	23		8		10		12		14		16		18	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				414.120.600		79.819.000		288.000.000		292.900.000		300.300.000		308.200.000		309.500.000

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	1.365		262		265		265		265		265		265	
Pengawasan Penanaman Modal				180.902.000		37.380.000		55.000.000		56.000.000		57.000.000		58.000.000		59.000.000
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	116		N/A		30		30		30		30		30	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				4.178.000		14.800.000		20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000

	Persentase Data dan Informasi yang ter update secara periodik	%	100		100		100		100		100		100		100	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4.178.000		14.800.000		20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000
	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan terintegrasi yang disajikan di website	%	100		100		100		100		100		100		100	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				4.178.000		14.800.000		20.000.000		20.400.000		20.900.000		21.400.000		21.600.000

	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4		4		5		5		5		5		5	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah				7.610.062.563		8.799.688.532		8.923.550.000		9.104.600.000		9.364.000.000		9.613.000.000		9.735.000.000
	IKM Mal Pelayanan Publik	Angka	92		92		92		92		92		92		92	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87		88		88		88		88		88		88	
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	4		4		4		4		4		4		4	

	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4		4		4		4		4		4		4	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.610.062.563		8.799.688.532		8.923.550.000		9.104.600.000		9.364.000.000		9.613.000.000		9.735.000.000
	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96		97		97		97		97		97		97	
	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A		N/A		60		60		60		60		65	
	Nilai kematangan organisasi	Nilai	43		43		43		43		43		43		43	
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.886.000		17.413.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.850.000		10.164.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		3		4		4		4		4		6	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.036.000		7.249.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	4		3		11		11		11		11		12	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.049.574. 885		5.526.43 8.532		5.512.64 5.000		6.024.469 .500		6.253.869 .500		6.472.369 .500		6.566.869.50 0
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.049.574. 885		5.461.45 8.532		5.428.36 5.000		5.940.189 .500		6.169.589 .500		6.388.089 .500		6.482.589.50 0
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	32		38		58		58		58		58		58	
Penyediaan Administrasi						64.980.0 00		74.280.0 00		74.280.00 0		74.280.00 0		74.280.00 0		74.280.000

Pelaksanaan Tugas ASN																
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	N/A		4		4		4		4		4		4	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	N/A		N/A		5		5		5		5		5	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000

	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Dokum en	N/A		N/A		9		9		9		9		9	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				931.924.4 52		720.613. 108		1.036.43 0.500		926.430.5 00		926.430.5 00		926.430.5 00		926.430.500
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A		2		2		2		2		2		2	
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pe nerangan Bangunan Kantor				6.324.000		8.000.00 0		10.000.0 00		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.000

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8		2		6		6		6		6		6	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.689.00 0		50.628.5 00		73.676.5 00		73.676.50 0		73.676.50 0		73.676.50 0		73.676.500
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		4		4		4	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.815.650		17.120.6 08		25.000.0 00		25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.00 0		25.000.000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	69		4		4		4		4		4		4	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				346.793.6 15		360.204. 500		382.754. 000		382.754.0 00		382.754.0 00		382.754.0 00		382.754.000

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	117		12		12		12		12		12		12	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.125.100		39.813.400		65.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	23.306		10		12		12		12		12		12	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				479.080.087		225.396.100		455.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72		60		100		84		84		84		84	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.097.000		19.450.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13.596		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				188.620.000		9.000.000		365.183.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	N/A			N/A		100		100		100		100		100
Pengadaan Mebel										25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A			N/A		N/A		10		10		10		10
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.620.000		9.000.000		200.633.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14			2		20		10		10		10		10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor								164.550.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000

atau Bangunan Lainnya																
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3		4		5		3		3		3		3	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.880.231.857		2.221.697.892		1.343.068.000		1.408.700.000		1.438.700.000		1.469.200.000		1.496.700.000
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				284.195.152		393.378.000		296.368.000		302.000.000		308.000.000		314.500.000		320.000.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12		12		12		12		12		12	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapora n	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.596.036. 705		1.828.31 9.892		1.046.70 0.000		1.106.700 .000		1.130.700 .000		1.154.700 .000		1.176.700.00 0
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12		12		12		12		12		12		12	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				552.825.3 69		304.526. 000		636.223. 500		540.000.0 00		540.000.0 00		540.000.0 00		540.000.000
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A		N/A		70		72		74		76		78	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				89.900.429		81.536.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46		11		16		16		16		16		16	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				383.320.590		100.100.000		185.943.500		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2		2		2		2		2		2	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.425.500		50.820.000		174.690.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000

	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		2		2		2		2		2		2	
Pemeliharaan Mebel										15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		N/A		N/A		15		15		15		15	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				58.178.850		72.070.000		125.590.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26		N/A		35		25		25		25		25	

Sumber: DPMPTSP Kab. Banyumas, 2025

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 terdapat 3 program prioritas yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Program prioritas adalah program yang menjadi fokus utama dalam mendukung rencana pembangunan. Selain itu, Program Prioritas juga dirancang untuk mencapai target capaian yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas DPMPTSP Kabupaten Banyumas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Mendukung program trilas Bupati yang ke 4 yaitu Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Mendukung program trilas Bupati yang ke 4 yaitu Pengembangan Sentra Pengusaha dan Petani Muda di Setiap Kecamatan
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Optimalnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sesuai SOP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Mendukung program trilas Bupati yang ke 13 Sistem Pelayanan Birokrasi yang Cepat, Mudah, Transparan dan Solutif

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	secara Elektronik	

Sumber: DPMPTSP Kab. Banyumas, 2025

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	%	NA	3,57	0,36	0,43	0,50	0,56	0,63	5,49
2.	Nilai Investasi Daerah	Miliar	1.353	1.400	1.405	1.411	1.418	1.426	1.435	7.765
3.	Nilai IKM penanaman modal	Angka	NA	89,60	89,80	90	90,20	90,40	90,60	90,60
4.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
5.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	4,18	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	4,25
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	87,35	87,50	87,55	87,60	87,70	87,80	87,90	87,90
7.	Nilai IKM MPP	Angka	NA	91,72	91,82	91,92	92,02	92,12	92,22	92,22

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, 2025.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase hasil pemetaan potensi investasi yang dipromosikan	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase calon investor yang menindaklanjuti kepedulian investasi	%	NA	NA	50	71	71	87,5	87,5	87,5
3.	Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100	NA	97	99	99,5	100	100	100
4.	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disetujui	%	NA	NA	23	35	47	59	71	71
5.	Persentase data dan informasi yang terupdate secara periodik	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	96,26	96,50	96,50	96,70	96,70	97,00	97,00	97,00
7.	Nilai Kematangan organisasi	Angka	43	43	43	43	43	43	43	43
8.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	NA	NA	60	60	60	60	65	65

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, 2025.

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 yang telah menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang/pengelola program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Seluruh pegawai pada setiap bidang/pengelola program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat

tercapai;

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala, serta pengendalian terhadap risiko yang timbul baik risiko strategis ataupun operasional;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas


KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP.
Pembina
NIP. 19800315 199912 2 001

LAMPIRAN I

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NO	Program/ Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE / TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangun g Jawab	Target Waktu Penyel esaian	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Investasi dan Pelayanan Penanaman Modal	1.1	Nilai Investasi Daerah	Realisasi Nilai Investasi Daerah Tidak Tercapai	-Minat Investor Rendah - Infrastrukt ur belum mendukung	-Penurunan kepercayaa n Investor dan Masyarakat - Pertumbuh an Ekonomi Daerah Terhambat	-Investor -Pemda	Kegiatan Pameran Promosi Investasi, Forum Investasi, Bimbingan Teknis LKPM. Fasilitasi Penanaman Modal	KE	Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	-Menyusun Regulasi Strategi Promosi Investasi Terpadu	Kepala DPMPTSP	Tahun 2026- 2030	DPMPTSP
				Potensi Realisasi Nilai Investasi belum terdata dengan baik	Kurang optimalnya pengelolaan data perizian baru dengan perizinan lama pada OSS dengan yang dipantau	Ada kegiatan usaha yang terlewat dari perhitunga n realisasi investasi	Pemda	Pembentukan Tim Kerja dan Penunjukan Admin pengolah data OSS	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Surat Edaran, Surat Keputusan Tim Kerja, Instruksi Kepala dan SK Tim	Kepala DPMPTSP	Tahun 2026- 2030	DPMPTSP

		1.2	Nilai IKM Penanaman Modal	Berkurangnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman modal	-Pelayanan belum memiliki predikat prima -Aplikasi sering mengalami gangguan	Nilai IKM Penanaman Modal tidak tercapai	- Masyarakat -Pemda	Survei IKM rutin setiap bulan. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan rutin setiap bulan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun SOP waktu penyelesaian yang lama, membuat surat edaran yang dapat diakses masyarakat terkait waktu penyelesaian sesuai hari kerja	Kepala DPMPPTSP	Tahun 2026-2030	DPMPPTSP
2	Optimalnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	2.1	1. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Nilai SPIP Perangkat Daerah	Budaya kerja kurang profesional	Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya kinerja	Target kinerja tidak tercapai	- Masyarakat -Pemda	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	- Surat Edaran Kepala Dinas terkait himbauan mengikuti pelatihan mandiri secara online melalui platform BKPSDM, BKPM dan/atau LAN	Kepala DPMPPTSP	Tahun 2029	DPMPPTSP